

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN
EKONOMI PARA NELAYAN
(Studi Kasus Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota
Banda Aceh)**

SKRIPSI



**Diajukan Oleh:
MOHD RIZKI
NIM. 170801107**

**Mahasiswa Fakultas Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Prodi Studi Ilmu Politik**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2023 M/ 1445 H**

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN
EKONOMI
PARA NELAYAN
(Studi Kasus Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota
Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-raniry

Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi

Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Politik

Diajukan Oleh:
MOHD RIZKI
NIM. 170801107

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Eka Januar, M.Soc.Sc.
NIP. 198401012015031003

Pembimbing II



Arif Akbar, M.A.
NIP. 199110242022031001

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN
EKONOMI PARA NELAYAN
(Studi Kasus Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota
Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Dan Dinyatakan Lulus Diserahkan Sebagai Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Program Studi Ilmu Politik


Diajukan oleh:
MOHD RIZKI
NIM. 170801107


Pada Hari/Tanggal: Senin, 18 Desember 2023
5 Jumadil Akhir 1445 H

Darussalam-Banda Aceh,
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,


Sekretaris,



Eka Januar, M.Soc.Sc.
NIP. 198401012015031003


Arif Akbar, M.A.
NIP. 199110242022031001

Penguji I,

Penguji II,


Rizkika Lhena Darwin, M.A.
NIP. 198812072018032001


Danil Akbar Taqwadin, B.IAM., M.Sc.
NIDN. 2008048903

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar- Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197403271999031005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Mohd Rizki
NIM : 170801107
Program Studi : Ilmu Politik
Falkutas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Tempat tanggal lahir : Tumpok Ladang, 26 Agustus 1999
Alamat : Meunasah Bak Trieng, Kec. Krueng Barona Jaya

Dengan ini menyatakan bahwa saya dalam penelitian skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan danmempertanggung jawabkan
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atautanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UINAr-Raniry.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 07 Desember 2023

yang mengatakan,



Raf
MOHD RIZKI
170801107

ABSTRAK

Salah satu kawasan perkotaan di wilayah Aceh yang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang luar biasa adalah Kota Banda Aceh yang terletak di Gampong Lampulo. Pokok pemberdayaan nelayan sangat penting di bahas apalagi di era globalisasi seperti saat ini, setiap negara dituntut untuk menjadikan kondisi kehidupan ekonominya menjadi semakin efektif, efisien, dan komperatif. Hal tersebut menjadi ironi karena terjadi justru ditengah masyarakat yang bekerja mencari sumber daya yang melimpah. Maka dari itu pemberdayaan yang tepat harus menyesuaikan aspek-aspek penyadaran peningkatan kapasitas dan pendayagunaan. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini peranan yang hendak di capai dari penyusunan rencana strategi dari aparatur jajaran Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Banda Aceh mempunyai sudut pandang yang sama dalam mensejahteraan dan meningkatkan pendapatan masyarakat gampong lampulo sesuai dengan 3 indikator peran yaitu regulator, dinamisator, fasilitator sebagai peran yang dijalankan pihak dinas dalam meningkatkan perekonomian para nelayan demi terciptanya nelayan yang sejahtera. Akan tetapi peranan pemerintah dalam segi pemberian bantuan masih belum merata. Ada beberapa faktor pendukungnya ialah pegawai yang memandai, kinerja yang baik, dan lokasi tempatnya sangat strategis. Kemudian faktor penghambatnya ialah anggaran dana yang terbatas, tingkat pendidikan yang masih kurang, fasilitas yang kurang memandai dan kurang partisipasi para nelayan. Peran Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Banda Aceh dalam peningkatan perekonomian para nelayan Gampong Lampulo berupa melaksanakan sosialisasi tentang pengetahuan nelayan agar bisa menambah wawasan bagi kelompok nelayan, dan juga pemberian bantuan yang dibutuhkan oleh nelayan seperti fasilitas alat tangkap itu salah satu mendorong nelayan menjadi sejahtera, serta pemberian bantuan kartu asuransi nelayan bagi para nelayan di Gampong Lampulo.

Kata kunci : *Peran Pemerintah, Pemberdayaan, Peningkatan Ekonomi, Nelayan*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat-Nya dari jaman jahiliyah menuju jaman islamiyah. Penyusunan skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Para Nelayan (Studi Kasus Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)” ini merupakan usaha yang penulis lakukan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Program Studi Ilmu Politik di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Eka Januar, M.Soc., Sc. dan Arif Akbar, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, motivasi serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

4. Rizkika Lhena Darwin, M.A., selaku Ketua Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
5. Seluruh Dosen Prodi Ilmu Politik dan Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, terutama kepada Prodi Ilmu Politik yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
6. Ayah dan Ibu tercinta Nawawi dan Jasmani, yang sangat luar biasa mendampingi penulis untuk bisa meraih pendidikan setinggi-tingginya, untuk do'a, cinta, dukungan dan kasih sayang yang tidak pernah berhenti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh dan masyarakat nelayan Gampong Lampulo yang sudah memberikan informasi, mendukung, memudahkan, dan banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kawan-kawan seperjuangan jurusan Ilmu Politik angkatan 2017 yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Atas semua dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis semoga menjadi amal baik dan ilmu dalam skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semuanya meskipun penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

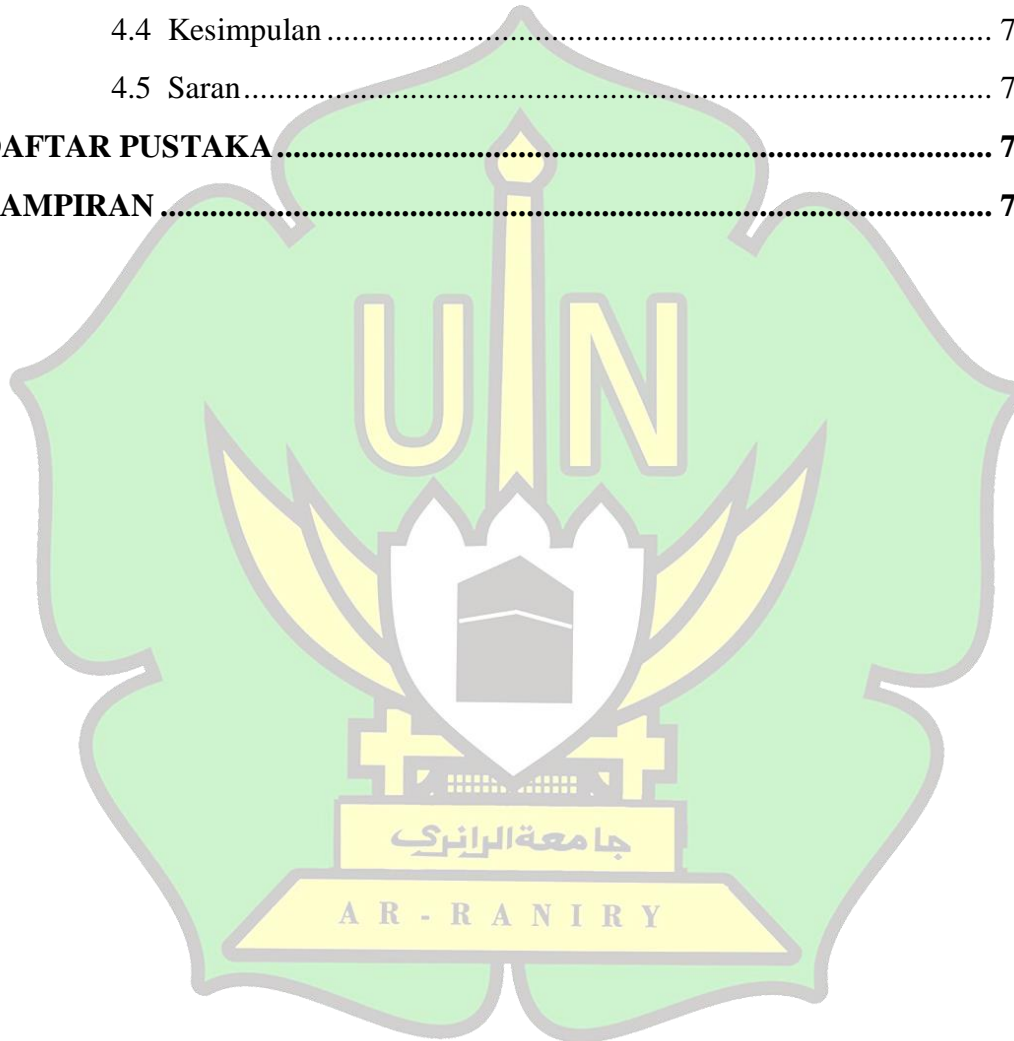
Banda Aceh, 07 Desember 2023
Penulis,

Mohd Rizki
NIM. 170801107

DAFTAR ISI

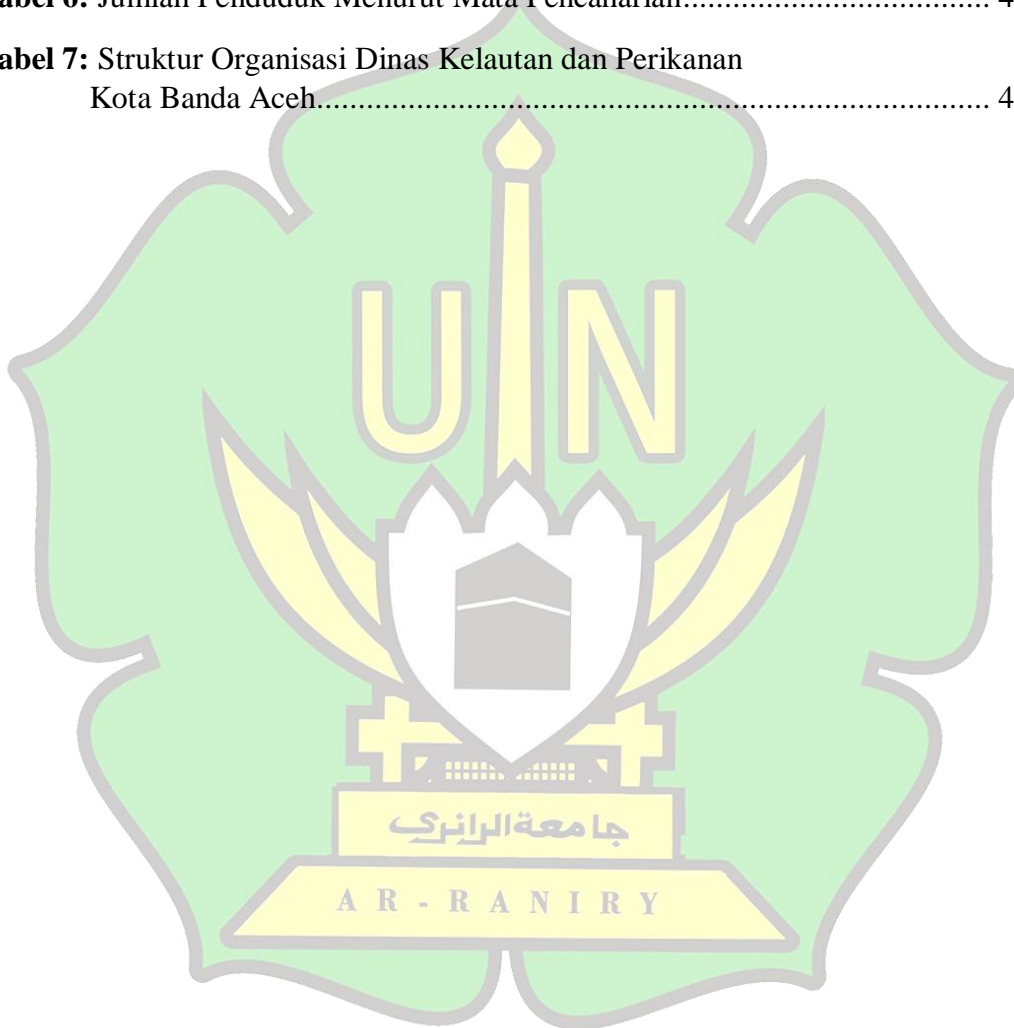
HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
LEMBAR KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Landasan Teori.....	6
2.1.1 Pengertian Peran.....	6
2.1.2 Pemerintah.....	10
2.1.3 Pemberdayaan.....	11
2.1.3 Nelayan.....	15
2.2 Penelitian Terdahulu.....	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Pendekatan Penelitian.....	28
3.2 Lokasi Penelitian.....	29
3.3 Sumber Data.....	29
3.4 Informan Penelitian.....	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.6 Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Gampong Lampulo dan Masyarakat nelayan.....	34
4.2 kondisi geografi gampong lampulo.....	36

4.3 Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh.....	45
4.4 Kondisi Masyarakat Nelayan Gampong Lampulo.....	47
4.5 Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Ekonomi nelayan	51
4.6 Faktor Pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi para nelayan.....	69
BAB V PENUTUP.....	73
4.4 Kesimpulan	73
4.5 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN.....	78



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Pembahasan Penelitian Terdahulu	19
Tabel 2: Informan Penelitian	29
Tabel 3: Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong.....	40
Tabel 4: Jumlah Penduduk Tahun 2023	42
Tabel 5: Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan	43
Tabel 6: Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	44
Tabel 7: Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh.....	46



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Peta Gampong Lampulo.....	36
Gambar 2: Kartu Nelayan.....	59
Gambar 3: Alur Pembuatan Kartu Nelayan.....	60
Gambar 4: Proses Mengajukan Bantuan	61
Gambar 5: Bangunan Pasar Ikan Lampulo	66
Gambar 6: Kartu Asuransi Nelayan	67



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kepulauan terbesar di dunia dengan kepulauan yang mempunyai struktur pulau-pulau yang tersebar luas dengan jumlah lebih dari 13.000 pulau besar dan pulau kecil serta garis pantai yang panjangnya sekitar 81.000 Km memberikan ciri khas pada lingkungan laut alaminya.¹ Salah satu provinsi yang terletak di ujung utara pulau sumatera dan wilayah paling barat di Indonesia yaitu Aceh yang memiliki potensi kekayaan sumber daya laut yang luar biasa, khususnya di sektor perikanan. Namun, potensi sumber daya laut Aceh saat ini belum dikelola secara optimal sehingga belum dapat memberikan manfaat yang signifikan kepada masyarakat nelayan. Ibukota Aceh adalah Banda Aceh, data terakhir tahun 2022 jumlah penduduk provinsi Aceh sekitar 5.407.855 jiwa dengan 23 kabupaten.²

Salah satu kawasan potensi sumber daya laut yang luar biasa di Kota Banda Aceh yang terletak di Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam. Pelabuhan Perikanan Lampulo yang terletak secara geologis 5.576336 N dan 95.323058 E, secara administrasi fungsional merupakan salah satu UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) yang berada di bawah Dinas Kelautan Dan

¹ M. Daud Silalahi, Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia dan Implementasinya Secara Regional, Sinar Harapan, Jakarta, 1992, hal.66

² Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh diakses dari <https://aceh.bps.go.id/indicator/12/55/1/jumlah-penduduk.html> diakses pada tanggal 23 Mei 2023 pada pukul 16.49 WIB.

Perikanan Kota Banda Aceh dan menjadi faktor penting untuk mendukung kemajuan Pelabuhan Perikanan lampulo menjadi Pelabuhan Perikanan yang berstandar nasional.³

Nelayan merupakan salah satu bagian dari anggota masyarakat yang mempunyai tingkat kesejahteraan paling rendah yang ditandai oleh adanya beberapa ciri seperti keterbelakangan sosial-budaya, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) disebabkan rata-rata para nelayan hanya lulus sekolah dasar yang hanya bisa mengandalkan keahlian yang terbatas.⁴ Nelayan menjadi salah satu konsen pemerintah untuk bisa diberdayakan agar menjadi lebih sejahtera.

Dilihat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 1 Pasal 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir yang dimana pasal 63 berbunyi, “Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraannya dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha masyarakat pesisir melalui peningkatan usaha masyarakat melalui peningkatan kapasitas pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar dan aset ekonomi lainnya.”⁵

³ <https://dkp.acehprov.go.id/index.php/profil/read/2016/10/12/116/pelabuhan-perikanan-lampulo.html> diakses pada tanggal 24 Mei 2023 pukul 16.20 WIB

⁴ Kusnadi, Jaminan Sosial Nelayan, (Yogyakarta: LkiS, 2007), hal.8.

⁵ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

Pokok pemberdayaan ekonomi nelayan sangat penting di bahas apalagi di era globalisasi seperti saat ini, setiap negara dituntut untuk menjadikan kondisi kehidupan ekonominya menjadi semakin efektif, efisien, dan komperatif. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk meningkatkan pendapatan mata pencaharian guna memperbaiki situasi dan kondisi ketika masa tua seorang nelayan kedepannya.

Pemberdayaan merujuk pada pemberdayaan keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial yang memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya.⁶

Diantara upaya Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menunjang peningkatan ekonomi masyarakat nelayan di Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan menerbitkan Kartu Nelayan melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adanya Kartu Nelayan ini diharapkan menjadi materi kongkret proses pemberdayaan nelayan sebagai mitra pemerintah dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan peningkatan pendapatan secara berkelanjutan, serta menjadi acuan pemerintah kota banda

⁶ Michael Mamentu. *Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan Tangkap di Kota Manado*, Jurnal, 2015. Universitas Sam Ratulangi. Hal 2

aceh dalam memberikan pembinaan dan bantuan kepada nelayan sehingga lebih tepat sasaran. Namun berdasarkan fakta yang ada nelayan buruh di Gampong Lampulo yang sudah bekerja lebih 20 tahun dan memiliki Kartu Nelayan namun tidak pernah mendapatkan bantuan berupa kapal maupun alat tangkap lainnya. Meskipun nelayan buruh mengetahui adanya pemberian bantuan kepada nelayan lainnya, namun tidak semua nelayan buruh pernah mendapatkan bantuan, maka dari itu kurangnya pemerataan pemberian bantuan kepada nelayan buruh.

Maka berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Para Nelayan (Studi Kasus Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh).

1.2 Rumusan Masalah

Dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka timbul permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Banda Aceh dalam pemberdayaan ekonomi para nelayan di Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh ?
2. Faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh dalam pemberdayaan ekonomi para nelayan di Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh dalam pemberdayaan ekonomi para nelayan di Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Banda Aceh dalam pemberdayaan ekonomi para nelayan di Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini baik bagi saya pribadi untuk keperluan akademis maupun secara praktis untuk masyarakat luas. Oleh sebab itu dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperkaya khasanah keilmuan Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Manfaat Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi para politisi kepada masyarakat mengembangkan potensi masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan berkualitas serta dapat memahami pentingnya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara sosial maupun ekonomi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Peran

Peranan berasal dari kata peran yang berarti sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama.⁷ Menurut terminology, pengertian dari peranan adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Peran diartikan sebuah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat serta kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu. Kedudukan merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Jadi seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role accupant*), suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.⁸

Pengertian peranan menurut David Barry dalam bukunya pokok-pokok penelitian dalam sosiologi, mendefinsikan peranan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.⁹ Sedangkan menurut Komarudin

⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1985, hlm. 73

⁸ R. Sutyo Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009, hlm.34

⁹ David Barry, *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*, Jakarta: CV Rajawali Press, 1984, hlm. 26

adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan seseorang dalam manajemen pola penilaian yang diharapkan dapat menyertai suatu status bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata, fungsi yang diharapkan dari seseorang adalah menjadi karakteristik yang ada padanya.

Peranan menurut Soejono Soekanto adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.¹⁰

Menurut Soekanto mendefinisikan peranan merupakan aspek dinamis seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka seseorang yang menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Soekanto juga menjelaskan peranan dalam dua bagian yakni peranan yang melekat pada diri seseorang dan peranan yang melekat pada posisi tepatnya dalam pergaulan masyarakat.¹¹

Menurut Iyas Yusuf dalam bukunya yang berjudul Peran dan Fungsi Pemerintahan dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat, bahwa fungsi pemerintah dalam kaitannya dalam pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran,

¹⁰ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 1982, hlm.23

¹¹ Soejono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1985, hlm.14

tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain:

1. Peran sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan sebagai regulator. Pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala menurutkegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

2. Peran sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai Dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara insentif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

3. Peran sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai Fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai macam kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak dibidang pendampingan

melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan, serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.¹²

Peranan didefinisikan secara sosiologis adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik maka dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subjektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹³

¹² Iyas, Yusuf. *Peran dan Fungsi Pemerintahan dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung : Humaniora, 2014 hlm.5.

Memperhatikan kesimpulan dari pendapat diatas dapat ditarik beberapa pokok pikiran mengenai peranan yaitu hak dan kewajiban serta adanya hubungan timbal balik antara peranan dan kedudukan.

2.1.2 Pemerintah

Pemerintah atau dalam bahasa inggris yang disebut dengan *government* adalah lembaga administrasi yang berkuasa atas aktivitas orang-orang dalam negara atau kota dan sebagainya. menurut David Apter, pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab khusus untuk mengikuti kerangka kerja yang menggabungkannya monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.¹⁴

Menurut Nuramelia, pemerintah adalah perkumpulan-perkumpulan yang mempunyai kedudukan untuk melakukan pengaturan melalui pelaksanaan peraturan dan pedoman di daerah-daerah tertentu yang daerahnya cukup banyak dipengaruhi. Pemerintah dalam arti luas di definisikan sebagai suatu jenis asosiasi yang bekerja dengan usaha menjalankan suatu tatanan pemerintahan diantaranya eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintah dalam arti sempit adalah suatu badan perkumpulan yang memiliki strategi sendiri untuk mengawasi dan mengarahkan jalannya suatu sistem pemerintahan.¹⁵

¹³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Press, 2002, hlm 242

¹⁴ Inu Kencana Syafie, *Pengantar ilmu pemerintahan*, Jakarta, Refika Aditama, 2010 hlm. 11

¹⁵ Nuramelia, *Defenisi pemerintah dan pemerintahan*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2014. hlm 7

Tugas pemerintah menurut Kaufman dalam Thoha merupakan bertujuan melayani dan mengarahkan masyarakat, tugas melayani lebih mengutamakan fokus pada kepentingan umum, menangani masalah publik, mempersingkat waktu proses penanganan masalah publik, dan memberikan pemenuhan kepada publik, sedangkan tugas mengarahkan lebih menekankan kekuasaan atau power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.¹⁶

2.1.3 Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata dasar “power” yang berarti kekuatan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Secara konseptual pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan yaitu sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan
2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan

¹⁶ Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003 hal.71

3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.¹⁷

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Proses pemberdayaan masyarakat faktanya merupakan elemen dari empat fungsi pemerintahan yaitu pemberdayaan (*empowering*), pembangunan (*development*), pengaturan (*regulation*) dan pelayanan (*public service*). Adapun fungsi yang dilakukan oleh pemerintah dalam kurun waktu tertentu akan menggambarkan kinerja pemerintah itu sendiri. Jika pemerintahan berikutnya dapat meneruskan kewajibannya dengan maksimal, maka tugas pokok dapat dijalankan dengan sempurna, contohnya pelayanan menghasilkan keadilan, pemberdayaan.

Menurut Widjaja dalam bukunya yang berjudul Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bulat dan Utuh, pemberdayaan didefinisikan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga masyarakat mampu mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.¹⁸

Menurut beberapa pakar yang terdapat dalam buku Edi Suharto menggunakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan. Person mengatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah

¹⁷ Edi Sugarto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*, Bandung: PT Ravika Adimatama 2005, Cet Ke-1, Hlm.57

¹⁸ Widjaja, HAW. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bulat dan Utuh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 169

proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam mengontrol dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.¹⁹

Menurut Mardikanto dan Soebianto menyatakan bahwa tujuan pemberdayaan meliputi berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

1. Perbaikan pendidikan dengan meningkatkan pendidikan melalui pemberdayaan tidak terbatas pada perbaikan materi, metode, tempat dan waktu, serta memfasilitasi hubungan dan menerima manfaat. Namun yang lebih penting adalah meningkatkan pendidikan, yang dapat menumbuhkan semangat belajar sepanjang hayat.
2. Perbaikan aksesibilitas melalui peningkatan aksesibilitas terutama tentang sumber informasi inovasi, sumber pendanaan, penawaran produk dan peralatan, sumber pendanaan, penawaran produk dan peralatan, dan aksesibilitas oleh lembaga pemasaran.
3. Perbaikan tindakan dimana pendidikan yang lebih baik dan aksesibilitas yang lebih baik dengan berbagai sumber daya yang lebih baik, diharapkan tindakan yang lebih baik akan diambil.

¹⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Danpekerja Sosial*, Bandung: Ptevika Aditam, 2005, Cet Ke1, Hlm 57

4. Perbaikan kelembagaan penyempurnaan langkah-langkah yang dilakukan diharapkan dapat memperbaiki sistem termasuk pengembangan jaringan kemitraan usaha.
5. Perbaikan usaha perbaikan di bidang pendidikan, aksesibilitas, acara dan institusi diharapkan dapat meningkatkan bisnis yang sedang berjalan.
6. Perbaikan pendapatan Perbaikan bisnis diharapkan dapat meningkatkan pendapatan, termasuk pendapatan keluarga dan sosial.
7. Perbaikan lingkungan pendapatan yang lebih tinggi diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial) karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau keterbatasan pendapatan.
8. Perbaikan kehidupan tingkat opini masyarakat dan kondisi lingkungan yang diciptakan batik diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup setiap keluarga dan masyarakat.
9. Perbaikan masyarakat harapannya kondisi kehidupan yang lebih baik akan mengarah pada kehidupan masyarakat yang lebih baik, didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik.²⁰

Berdasarkan definisi pemberdayaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok rentan dan lemah dalam masyarakat termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan sehingga mereka memiliki keberdayaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial seperti kepercayaan diri, maupun

²⁰ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2012, hal.111-112

menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencahariaan, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.²¹

2.1.4 Nelayan

Secara umum nelayan diartikan sebagai orang yang bermata pencahariannya menangkap ikan, penangkapan ikan dilaut. Berdasarkan kepentingan dan latar belakangnya nelayan dibedakan menjadi: nelayan pemilik (Juragan) adalah orang atau perseorangan yang melakukan usaha penangkapan ikan , dengan hak atau berkuasa atas kapal/perahu dan/atau alat tangkap ikan yang dipergunakan untuk menangkap ikan. Nelayan penggarap (buruh/pekerja) adalah seorang yang menyediakan tenaganya atau bekerja untuk melakukan penangkapan ikan yang pada umumnya merupakan satu kesatuan dengan yang lainnya dengan mendapatkan upah yang berdasarkan bagi hasil dari penjualan ikan yang ditangkap.

Menurut Sastrawidjaya dalam bukunya yang berjudul Nelayan nusantara, mengartikan komunitas nelayan adalah kumpulan orang yang bermata pencaharian hasil laut dan tinggal di tepi pantai atau pesisir²². komunitas nelayan dapat dilihat dari bermacam segi sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi mata pencaharian, nelayan merupakan orang yang segala kegiatannya berhubungan dengan lingkungan laut dan orang yang menjadikan perikanan sebagai mata pencaharian.

²¹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Danpekerja Sosial*, Bandung: Ptevika Aditam, 2005, Cet Ke1, Hlm 60

²² Sastrawidjaya. *Nelayan nusantara*. Jakarta: Pusat Riset Pengolahan Produk Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 2002 hlm.25.

2. Dilihat dari segi cara hidup, masyarakat nelayan merupakan masyarakat gotong royong sehingga kebutuhan gotong royong dan tolong-menolong terasa amat penting pada saat untuk mengatasi keadaan yang menuntut pengeluaran biaya besar dan pengerahan tenaga banyak seperti saat melaut, membangun rumah atau tanggul penahan gelombang di sekitar perdesaan.
3. Dilihat dari segi tampilan ,meskipun pekerjaan nelayan merupakan pekerjaan berat akan tetapi pada hakikatnya mereka hanya mempunyai keterampilan sederhana dan Kebanyakan bekerja sebagai nelayan adalah profesi yang di turunkan oleh orang tua bukan yang dipelajari secara professional.

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Ada 3 poin penting yang harus dijalankan: Pertama, Pemerintah Aceh wajib membuat kebijakan turunan Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam di Aceh. Kedua, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh wajib melibatkan Panglima Laot, Perwakilan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam pada proses penyusunan dan penetapan rencana Strategis Dinas Kelautan Dan Perikanan Aceh dalam mengimplementasikan Undang-Undang No 7 Tahun 2016. Ketiga, Pemerintah Aceh berkomitmen

mengalokasikan anggaran dalam memenuhi hak-hak dasar nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam demi kesejahteraan mereka.²³

Indikator kesejahteraan lainnya menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)²⁴ sebagai berikut:

1. Keluarga sejahtera tahap I adalah keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar, yaitu umumnya seluruh anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih, seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah/sekolah dan berpergian, rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap lantai dan dinding yang baik, bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan, bila pasangan usia subur ingin berKB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi, semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.
2. Keluarga sejahtera tahap II adalah keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar (kesejahteraan tahap I) dan psikologis. Adapun indikator-indikator tersebut yaitu pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Paling kurang sekali seminggu menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk dan pauk. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru per tahun. Luas lantai rumah paling kurang 8 m² tiap penghuni rumah. Seluruh anggota keluarga dalam tiga bulan

²³ Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 *Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.*

²⁴ Rosni, *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara* (Batu Bara: Jurnal Geografi, Vol 9, No.1,2017), Hal.58-59

terakhir dalam keadaan sehat. Ada seseorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan. Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bisa membaca tulisan latin. Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi kecuali yang sedang hamil.

3. Keluarga sejahtera tahap III adalah keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan pengembang. Indikator-indikator tersebut yaitu mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama. Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga dalam bentuk uang dan barang. Kebiasaan makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga. Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/TV/internet.
4. Keluarga sejahtera tahap III Plus adalah keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan aktualisasi diri seperti secara teratur atau pada waktu tertentu dengan sukarela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/ yayasan/ intitusi masyarakat. Penulis menggunakan indikator menurut BKKBN, karena indikator yang diberikan sesuai dengan objek penelitian yang penulis lakukan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari dari duplikasi dari berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti yang ada pada tabel di bawah sebagai berikut:

Tabel 1. Pembahasan Penelitian Terdahulu

1.	Nama peneliti	Ayu Mentari Suryadi & Sufi (2019)
	Judul penelitian	Strategi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Nelayan (Studi Di Kantor Camat Muara Batu Kabupaten Aceh Utara)
	Metode penelitian	Deskriptif kualitatif
	Hasil	Prosedur otoritas publik untuk membentengi jaringan penangkapan ikan adalah dengan menawarkan bantuan kepada pemancing melalui alat tangkap. Metodologi ini sangat mempengaruhi perluasan tangkapan pemancing, sehingga sangat membantu pemancing dan dapat membantu pemancing secara keseluruhan untuk menemukan kesuksesan. Batasan batin khususnya tidak adanya bantuan dan rencana keuangan, tidak adanya SDM dan tidak adanya pengawasan.

		Kendala eksternal adalah tidak adanya kepedulian daerah dan tidak adanya kontribusi daerah.
	Persamaan & Perbedaan	Persamaan penelitian Ayu Mentari Suryadi & Sufi dengan penelitian saat ini adalah peneliti saling membahas tentang pemberdayaan masyarakat nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan dan metode penelitian yang digunakan juga menggunakan kualitatif. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini objek dan tempat penelitiannya yang dimana penelitian ini dilakukan di Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.
2.	Nama penelitian	Zulfiani, A. Gau Kadir dan Nurlinah (2012)
	Judul penelitian	Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.
	Metode penelitian	kualitatif
	Hasil	Tugas pemerintah daerah dalam melibatkan jaringan tepi laut pemberantasan kemiskinan di wilayah pesisir dan fokus perikanan merupakan salah satu kegiatan penting untuk

		<p>melengkapi kemajuan kelautan dan perikanan. Sesuai informasi dari Focal Department of Measurements, ada 7,87 juta orang miskin di daerah tepi pantai, atau 25,14% dari 31,02 juta orang yang membutuhkan di negara ini. Pada tahun 2013, garis kemiskinan Rezim Polewali Mandar adalah Rp 182.396 (BPS 2013). Tujuan PNPM Mandiri KP adalah untuk meningkatkan limit usaha dan bantuan pemerintah, membina pelaku usaha bagi individu KUKP dan menggarap kualitas alam. PNPM Mandiri KP diharapkan dapat mengembangkan KUKP di daerah/perkotaan yang meliputi perikanan tangkap, pengembangan, penanganan dan promosi produk ikan, garam perorangan dan jaringan pesisir lainnya.</p>
	<p>Persamaan & Perbedaan</p>	<p>Persamaan penelitian Zulfiani, A. Gau Kadir dan Nurlinah dengan penelitian saat ini adalah peneliti saling membahas tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat dan pokok fokus penelitian</p>

		<p>kepada pemerintah daerah dan metode penelitian yang digunakan juga menggunakan kualitatif. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini objek dan tempat penelitiannya yang dimana penelitian ini dilakukan di Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dan pokok permasalahan tentang mengatasi kemiskinan.</p>
3.	Nama penelitian	Windasai, Mohammad Mas'ud Said dan Hayat (2021)
	Judul penelitian	Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Kepulauan Masalembu Kabupaten Sumenep).
	Metode penelitian	Kualitatif
	Hasil	<p>Dalam setiap keberadaan manusia, dia memainkan peran baru sepanjang kehidupan sehari-hari. Menurut Poerwadar Minta, pekerjaan dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam keadaan atau kesempatan tertentu. Kegiatan yang dilakukan adalah gerakan yang seharusnya dilakukan oleh individu yang</p>

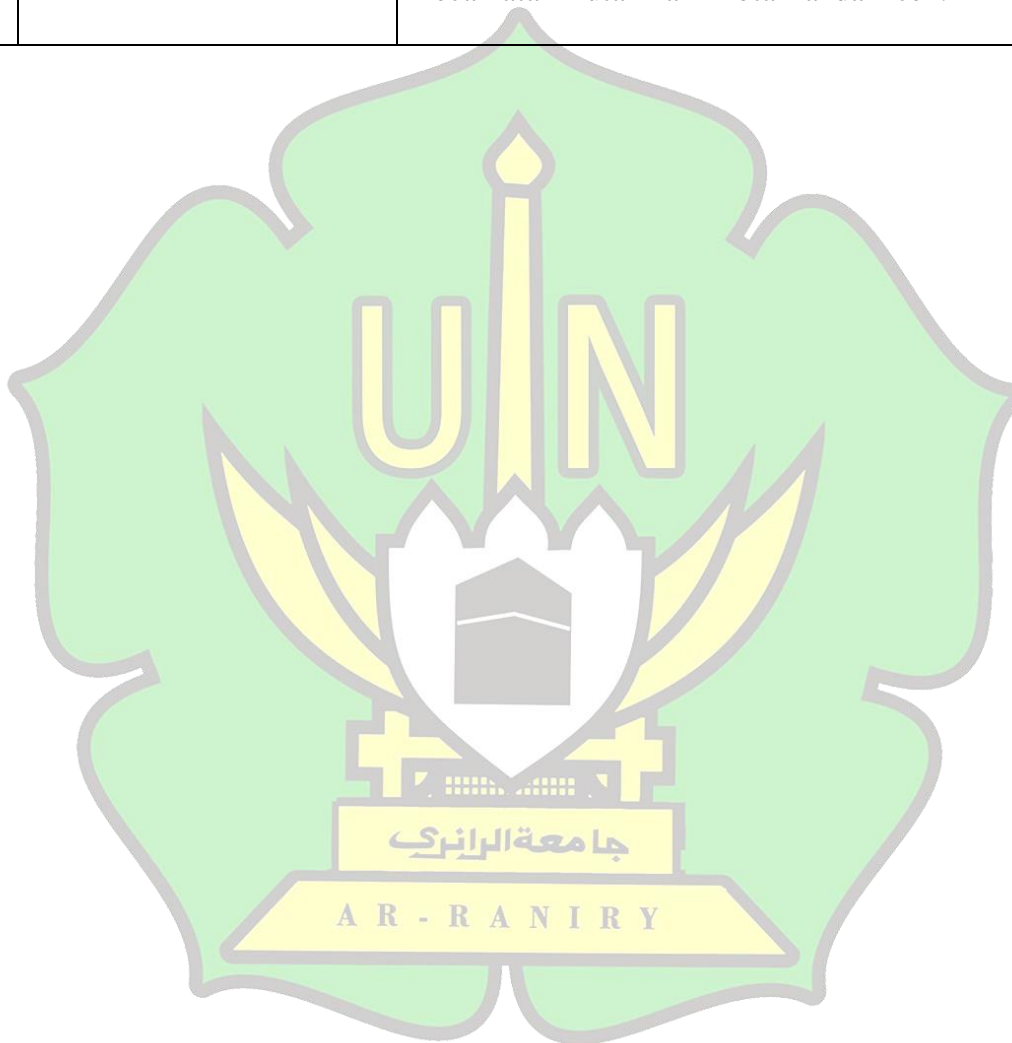
		<p>dilakukan. Tinggal atau dalam situasi tertentu sehubungan dengan permintaan sosial. Apalagi otoritas publik, dalam situasi ini otoritas publik berperan untuk menggarap bantuan pemerintah jaringan penangkapan ikan. Sedangkan menurut Van Poelje dan Anggraini yang secara keseluruhan disebut administrasi adalah suatu kemampuan yang memadukan kegiatan, kegiatan dan pilihan-pilihan melalui alat-alat pemerintahan untuk mencapai tujuan (organisasi) pemerintahan. Sementara itu, kekuasaan publik dalam pengertian terbatas adalah suatu organ/kekuasaan/badan negara yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan atau penyelenggaraan pemerintahan.</p>
	<p>Persamaan & perbedaan</p>	<p>Persamaan penelitian Windasai, Mohammad Mas'ud Said dan Hayat dengan penelitian saat ini adalah peneliti saling membahas tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat nelayan dan pokok fokus penelitian kepada pemerintah daerah dan metode penelitian yang digunakan</p>

		juga menggunakan kualitatif. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini objek dan tempat penelitiannya yang dimana penelitian ini dilakukan di Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.
4.	Nama penelitian	Farah Dessy Tuasamu (2019)
	Judul penelitian	Orientasi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Nelayan) Di Dusun Mamua Desa Hilla Kecamatan Leihitu.
	Metode penelitian	Deskriptif kualitatif
	Hasil	Mengatur sebagai cara untuk mencapai tujuan penataan adalah aktivitas yang didasarkan pada fakta bahwa pencapaian tujuan tertentu telah selesai. Tujuan yang ideal adalah untuk mengatasi masalah saat ini, jangka menengah, dan jangka panjang. Rencananya sengaja berfokus pada peningkatan yang dibutuhkan dan mencoba peningkatan yang tepat dan diinginkan. Perencanaan juga mencakup aktivitas pemesanan secara bijaksana, sedikit demi sedikit, dan selalu sesuai dengan sekumpulan sasaran atau tujuan untuk

		<p>mencapainya. Rencananya untuk menjawab semua keluhan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan di pemukiman Mamua Negeri Hira di Kecamatan Reichs Kabupaten Maluku Tengah.</p>
		<p>Persamaan penelitian Farah Dessy Tuasamu dengan penelitian saat ini adalah peneliti saling membahas tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat nelayan dan pokok fokus penelitian kepada pemerintah daerah dan metode penelitian yang digunakan juga menggunakan kualitatif. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini objek dan tempat penelitiannya yang dimana penelitian ini dilakukan di Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.</p>
5	Nama penelitian	Reinaldo Rumlus, Johny Lumolos dan Michael Mantiri (2017)
	Judul penelitian	Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Suatu Studi Pada Kelompok Nelayan Di Desa Trikora Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat)

Metode penelitian	kualitatif
Hasil	<p>Penelitian yang dipimpin oleh para analis mengungkapkan bahwa ada masalah yang berbeda dengan penguatan. artinya bantuan kurang, penguatan yang dilakukan tidak dirasakan oleh sebagian besar perhimpunan lokal, khususnya perhimpunan pemancing, dan penguatan belum meluas, karena inisiatif wali kota yang sedang berjalan dan penguatan ketua yang lama belum tercapai. tujuan. Hal-hal tersebut membutuhkan penguatan kawasan dari pemerintah daerah untuk menjaga daya tahan mereka, sehingga pemerintah kota idealnya melakukan tujuan utamanya dalam hal penguatan kawasan, khususnya perkumpulan nelayan.</p>
Persamaan & perbedaan	<p>Persamaan penelitian Reinaldo Rumulus, Johny Lumolos dan Michael Mantiri dengan penelitian saat ini adalah peneliti saling berbahas tentang Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat dan pokok fokus penelitian kepada pemerintah daerah dan metode penelitian yang digunakan juga</p>

		menggunakan kualitatif. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini objek dan tempat penelitiannya yang dimana penelitian ini dilakukan di Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.
--	--	---



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Dari permasalahan yang penulis sajikan dalam penelitian ini maka pendekatan yang dipilih ialah pendekatan kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang mendeskripsikan dan menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati secara sistematis. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa perkataan, catatan dan dokumen. Data tersebut mencakup transkrip wawancara, dokumen pribadi dan resmi, gambar dan rekaman-rekaman resmi lainnya.²⁵

Menurut Sugiono dalam bukunya yang berjudul Memahami Penelitian Kualitatif, bahwa penelitian kualitatif artinya metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalitation*.²⁶

Dengan demikian penelitian kualitatif ini mengutamakan hubungan secara langsung antara penulis selaku peneliti dengan subyek yang diteliti dan peneliti sendiri merupakan alat pengumpul data utama. Dengan cara

²⁵ Lexy J. Moleong, 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset. hlm.3

²⁶ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009, hal. 1

menggunakan metode ini maka peneliti akan mendapatkan data secara utuh dan dapat dideskripsikan secara jelas sehingga jenis penelitian kualitatif deskriptif sekiranya lebih tepat untuk digunakan, dan kemudian hasil dari penelitian ini dapat benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan secara apa adanya.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di dinas kelautan dan perikanan kota banda aceh dan gampong lampulo. Dengan demikian penelitian lokasi yang dipilih penulis selain mudah dijangkau oleh peneliti. kemudian efektif dan efisien dari segi waktu, biaya dan tenaga serta merupakan lokasi yang sangat tepat untuk memperoleh data atau informasi yang akurat dan relevan dengan permasalahan penelitian yang ada.

3.3 Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini didapatkan dari subjek penelitian yang didapat, adapun jenisnya adalah:

a) Sumber data Primer

Sumber ini didapatkam dengan menganalisis secara mendalam dari sumber penelitian secara langsung kepada kepada subjek yang sudah penulis tentukan. Penulis mengamati lapangan dengan melakukan wawancara. Subyek yang diwawancara mampu dipercaya untuk menghasilkan data yang benar. Jadi penelitian dilakukan dengan

wawancara dan observasi yang untuk mendapatkan data untuk memecahkan persoalan dalam penelitian yang akan dibuat.

b) Sumber data Sekunder

Sumber data ini merupakan data-data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, melalui beberapa media yang mendukung seperti jurnal, dokumentasi dan lainnya. Hal ini bertujuan agar data yang didapat dari subyek lebih pasti.

3.4 Informan Penelitian

Tabel 2. Adapun informan dari penelitian ini adalah:

No	Informan Penelitian	Jabatan	Jumlah
1.	Dinas pangan, pertanian, kelautan dan perikanan	Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan	1 orang
2.	Pemerintah Gampong	Keuchik	1 orang
3.	Nelayan	Buruh Nelayan/masyarakat	10 orang

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat didapatkan melalui berbagai macam teknik antara lain:

3.5.1 Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui hubungan pribadi antara peneliti dengan sumber data dan wawancara dilakukan karena ada anggapan bahwa hanya subjeklah yang mengerti tentang diri mereka sendiri sehingga informasi yang tidak didapatkan melalui pengamatan atau alat lain akan diperoleh melalui wawancara.²⁷

Wawancara dilakukan dengan pedoman wawancara yang dibuat oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan informasi yang ingin didapatkan. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan tujuan agar peneliti mendapat informasi secara lengkap dan akurat. Pertanyaan dalam wawancara dibuat oleh peneliti dalam pedoman wawancara yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan informasi yang diperlukan.

3.5.2 Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Catatan lapangan adalah data yang tidak didapat melalui wawancara, namun melalui rekaman peneliti atas semua peristiwa konkrit yang terjadi dan berhubungan dengan penelitian.

²⁷ Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, hal 73

Setiap data yang diambil akan direkam dan dicatat. Selanjutnya, setelah semua data terkumpul maka yang dilakukan peneliti ialah analisis data dan interpretasi data dengan mengacu pada kajian pustaka yang telah ada. Hasil wawancara sekaligus melengkapi data yang peneliti dapatkan. Setiap data yang diperoleh akan diinterpretasikan untuk menggambarkan keadaan dengan mengacu pada kajian teori dan kajian pustaka.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian kualitatif ini menggunakan proses mencari dan mengumpulkan informasi secara efisien diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi yang diambil di lapangan tempat penelitian. Dijelaskan juga oleh Nasution menyatakan “ Analisis dimulai sejak mencari tahu dan memaknai masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan langsung menuju penyusunan hasil penelitian . Namun, dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih banyak dilakukan selama siklus di lapangan seiring dengan pengumpulan data.”²⁸

Teknik analisis data adalah teknik untuk menyusun dan mengolah informasi menjadi data sehingga informasi tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga berguna untuk pemecahan masalah dalam penelitian sehingga bisa mengambil kesimpulan. Ada beberapa cara untuk

²⁸ Nasution S. *Metode penelitian Naturalistik kualitatif*, Bandung: tarsiti, 1988, hal 89

penganalisaan data menurut Sugiono dalam analisis data untuk mempermudah dalam mengolah data sebagai berikut:²⁹

- a) Mengumpulkan beberapa data untuk dipilah serta dilakukan analisis
- b) Menyeleksi data-data yang signifikan dengan penelitian
- c) Menganalisis pembahasan serta menyimpulkan.



²⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007,hal 27.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gampong Lampulo dan Masyarakat Nelayannya

Gampong lampulo merupakan sebuah gampong yang terletak di tepi sungai krueng aceh dan berdekatan langsung dengan lautan. Pada dasarnya wilayah pesisir di gampong lampulo salah satu wilayah potensial yang perekonomiannya dari hasil tangkapan melaut, potensi perekonomian di lampulo didominasi dalam bidang perikanan yang diantaranya nelayan, pedagang ikan dan buruh di TPI Lampulo. Gampong lampulo memiliki pelabuhan tempat pelelangan Ikan, bahkan saat ini telah dibangun Pelabuhan Perikanan Samudra(PPS) lampulo, yang akan menjadi tempat berlabuhnya berbagai kapal besar maupun kecil. Hal ini menjadi potensi bagi gampong dalam usaha mensejahterakan masyarakat gampong, mengingat selama ini banyak warga gampong lampulo yang mengantungkan mata pencariannya di PPS tersebut. Baik sebagai buruh muat, pedagang dan lainnya.

Selain keberadaan PPS samudra yang berdampak langsung perekonomiannya terhadap masyarakat gampong lampulo di gampong lampulo juga terdapat monumen tsunami bot diatas rumah. Keberadaan monumen tersebut juga sangat berdampak bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Salah satunya berkembangnya UMKM di sekitaran monumen. Dan juga penyerapan tenaga kerja, dimana sampai saat ini di

monumen tersebut terdapat petugas warga gampong lampulo yang bekerja menjaga monumen tsunami.

Masyarakat pesisir gampong lampulo yang pekerjaannya mayoritas adalah nelayan, yang keberlangsungan hidupnya bergantung hasil melaut. Menurut Arif Satria masyarakat pesisir adalah sekelompok orang yang hidup bersama di wilayah pesisir dan membentuk budaya yang berbeda berdasarkan ketergantungan mereka pada sumber daya pesisir dikenal sebagai masyarakat pesisir. Karena mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan, masyarakat pesisir ini biasanya disebut sebagai masyarakat nelayan.³⁰

Kegiatan nelayan di gampong lampulo hanya bergantung pada hasil tangkap saat melaut, pekerjaan tersebut tidak menjamin terhadap pendapatan dikarenakan kadang kala faktor cuaca yang tidak mendukung yang membuat nelayan tidak bisa melaut. Menurut Rosni, ikan, udang, rumput laut, kerang, terumbu karang, dan kekayaan laut lainnya merupakan sumber pendapatan utama bagi masyarakat yang tinggal di pesisir pantai yang dikenal sebagai nelayan.³¹

³⁰ Arif Satria ,*Pengantar sosiologi masyarakat pesisir*, Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2015,hal 47

³¹ Rosni. Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara. Jurnal Vol. 9 No. 1, Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan,2017, Hal 53

4.2 Kondisi Geografis Gampong Lampulo

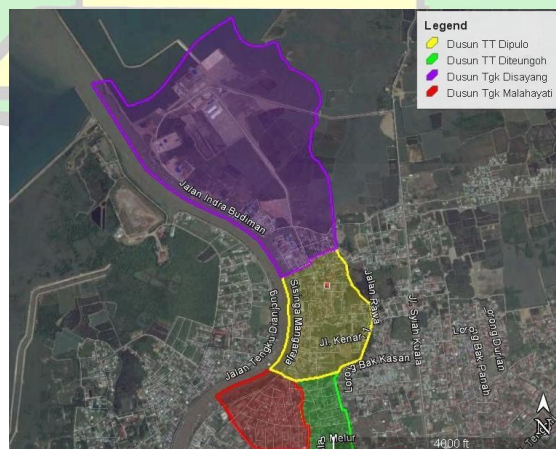
Gampong Lampulo merupakan Gampong yang terletak di Kecamatan Kuta Alam dengan luas wilayah 154,5 Ha, adapun batas-batas gampong Lampulo adalah sebagai berikut :

- Utara : Gampong Lamdingin dan Gampong Deyah Raya
- Selatan : Gampong Mulia
- Timur : Gampong Lamdingin
- Barat : Krueng Aceh

Jumlah dusun yang ada di Gampong Lampulo terdiri atas 4 (empat) Dusun yaitu :

- Dusun T. Tuan Dipulo
- Dusun Malahayati
- Dusun Tgk. Disayang
- Dusun T. Teungoh

Gambar 1: peta gampong lampulo



4.2.1 Visi dan Misi Gampong Lampulo

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Gampong. Penyusunan Visi Gampong Lampulo ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Gampong Lampulo seperti Pemerintah Gampong, TPG, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Masyarakat Gampong dan masyarakat gampong pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di gampong seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Gampong Lampulo adalah “Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Menguasai IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) dan IMTAQ (Iman dan Taqwa) serta Mandiri dan Amanah.”

b. Misi

Selain penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh gampong agar tercapainya visi Gampong tersebut. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan

kebutuhan Gampong Lampulo sebagaimana proses yang dilakukan maka Misi Gampong Lampulo adalah:

- 1) Menjalankan Syariat Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan guna memantapkan kualitas IMTAQ.
- 2) Meningkatkan akses Warga Gampong dalam menempuh pendidikan dan penguasaan teknologi.
- 3) Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas produksi dan peningkatan produktivitas.
- 4) Memberdayakan usaha ekonomi dan kreativitas warga dengan berbasis pada pemanfaatan potensi ekonomi lokal.
- 5) Meningkatkan kemampuan aparatur perangkat Pemerintahan Gampong melalui pemantapan kinerja, disiplin, layanan, tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi.
- 6) Meningkatkan partisipasi pemuda dan kaum perempuan dalam pembangunan Gampong.
- 7) Memantapkan Wawasan Kebangsaan dan Bernegara dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.2.2. Struktur Organisasi Gampong Lampulo

Tabel 3 : Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong

Aparatur Pemerintahan Gampong	Nama	Tugas Yang Dijalankan	Keterangan
Tuha Peut	M.Dahlan	Mengkoordinir lembaga Tuha Peut	Ketua
	M.Thaib Zakaria	Menjalankan Fungsi Pengawasan dan membuat kebijakan bersama Keuchik	Wakil
	Yusmadi Ys		Anggota

	M.Zubir Ali		
	T. Zulfikar		
	Hasan Basri		
	Murdani		
	Jasman, SE		
	Ir. Maimun Rizali Hadi		
Keuchik	Alta Zaini	Menjalankan dan memegang kekuasaan Penyelenggaraan pemerintah Gampong	Pejabat Keuchik
Sekretaris Gampong	Bahrul Ikhsan, S.Kel	Membantu Tugas Penyelenggaraan Pemerintahan sebagai koordinator pelayanan administrasi, keuangan, menyusun rancangan peraturan-peraturan yang ada di Gampong	
Imeum Gampong	Tgk.Sofyan Umar	Menjalankan kegiatan keagamaan Gampong	
Kasi Pemerintahan	Delfi Meliyana	Melaksanakan tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi Gampon, Pembinaan masalah Pertanahan pembinaan Ketentraman dan ketertiban pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil Gampong.	-
Kasi Umum dan perencanaan	Reza Septinaldi	Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tatanaskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi dan penataan administrasi perangkat gampong dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring serta evaluari program, serta	-

		penyusunan laporan.	
Kaur Keuangan	Kiyamuddin	Melaksanakan urusan keuangan, administrasi keuangan,, administtrasi sumber sumber pendapatan dan pengeluaran, vesrivikasi administrasi keuangan ,dan administrasi penghasilan keuchik, perangkat gampong, TPG dan Lembaga Pemerintahan Gampong Lainnya.	-
Kasi Pelayanan	Syarifah Rahmani	Menjalankan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya pparsitipasi masyarakat pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, syariat Islam keagamaan dan ketenagakerjaan	-
Kasi Kesejahteraan	Irvan Maulana Putra	Melaksanakan pembanngunan sarana dan prasarana Gampong, pembangunan bidang pendidikan kesehatan dan tugas sosialisasi serta motivasi Masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik lingkungan hidup pemberdayaan keluarga, pemuda olahraga dan karang taruna.	-
Kepala Dusun	Taufik M	Mengkoordinir kehidupan bermasyarakat yaitu Pembangunan dan kesejahteraan ditingkat Dusun	T.T.Dipulo
	Azhari		Malahayati
	Faisal Amir		Tgk.Disayang
	Tarmizi		T.Teungoh

4.2.3. Kondisi Demografis Gampong Lampulo Sosial

a. Sosial Budaya dan Ekonomi

Gampong Lampulo merupakan gampong yang berada dalam wilayah administratif Kecamatan Kuta Alam, kondisi sosial ekonomi Gampong sudah sedikit berpengaruh dengan kebudayaan perkotaan hal ini dikarenakan Kecamatan Kuta Alam berdekatan dengan wilayah Kota Banda Aceh. Namun demikian sikap saling membantu satu sama lainnya masih ada dalam kehidupan kemasyarakatan digampong.

Gampong Lampulo terletak dipinggir sungai Krueng Aceh dan juga berdekatan dengan muara. Gampong Lampulo memiliki pelabuhan tempat pendaratan ikan sekaligus Tempat Pelabuhan/Pelelangan Ikan, bahkan saat ini telah dibangun Pelabuhan Perikanan Samudra yang akan menjadi tempat berlabuhnya berbagai kapal besar maupun kecil. Hal ini menjadi potensi bagi gampong dalam usaha mensejahterakan masyarakat gampong, mengingat selama ini banyak warga gampong Lampulo yang mengantungkan mata pencariannya di PPS tersebut. Baik sebagai buruh muat, pedagang dan lainnya.

Selain keberadaan PPS Samudra yang berdampak langsung perekonomiannya terhadap Masyarakat Gampong lampulo. Di gampong Lampulo juga terdapat monumen Tsunami Bot diatas Rumah. Keberadaan monumen tersebut juga sangat berdampak bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Salah satunya berkembangnya UMKM di

sekitaran monumen. Dan juga penyerapan tenaga kerja, dimana sampai saat ini di monumen tersebut terdapat petugas warga Gampong Lampulo yang berkerja menjaga monumen Tsunami.

Keberadaan Lahan kosong milik warga juga menjadi peluang pertumbuhan ekonomi. Dimana beberapa lahan kosong sekarang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok usaha budidaya perikanan. Dengan didukung oleh pemerintah setempat dalam penyediaan sarana prasarana Budidaya perikanan dapat dilakukan di dalam lahan kosong milik warga tersebut.

b. Kepadudukan Gampong Lampulo

Dari penelusuran penulis terhadap laporan kepadudukan Gampong lampulo jumlah penduduk pada tahun 2023 berjumlah 5431 jiwa dari 4 dusun yang terdiri T.T.Dipulo, Malahayati, Tgk.Disayang, T. teungoh dan jumlah penduduk terbagi antara laki-laki dan perempuan berdasarkan dusun dalam rincian seperti pada tabel berikut:

Tabel 4: Jumlah penduduk tahun 2023

No	Nama	Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	T.Tuan Dipulo	1087	1001	2088
2.	Malahayati	716	765	1481
3.	Tgk. Disayang	502	452	954

4.	T. Teungoh	470	438	908
Jumlah				5431

Sumber: laporan kependudukan Gampong Lampulo

Selanjutnya jumlah penduduk menurut pendidikan berdasarkan data laporan Kantor Keuchik gampong Lampulo seperti terlihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 5: Jumlah penduduk menurut pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Belum sekolah	479
2.	Belum Tamat SD	353
3.	Tamat SD	712
4.	Tamat SLTP	1337
5.	Tamat SLTA	1561
6.	Tamat Diploma I/II	361
7.	Tamat Diploma III	244
8.	Strata I	234
9.	Strata II	77
10.	Strata III	73
Total jumlah		5431

Sumber: Profil Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Tahun 2023

Dapat dilihat dari tabel di atas menjelaskan bahwa rata-rata penduduk Gampong Lampulo telah menyelesaikan jenjang pendidikan

sampai Strata I (S1) hal tersebut menunjukkan kesadaran masyarakat Gampong Lampulo terhadap pendidikan itu sangat tinggi, kemudian sebagiannya sudah menyelesaikan jenjang pendidikan sampai S2 dan S3 yang menjadi sebuah potensi sehingga menjadi promotor Gampong Lampulo menuju kearah lebih maju.

Selanjutnya jumlah penduduk menurut mata pencaharian berdasarkan data laporan Kantor Keuchik gampong Lampulo seperti terlihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 6: Jumlah penduduk menurut mata pencaharian

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	PNS	985
2.	TNI/POLRI	105
3.	Karyawan Swasta	696
4.	Pedagang	867
5.	petani	7
6.	Nelayan	338
7.	Pertukangan	222
8.	Lain-lain	2010
Jumlah		5230

Sumber: Profil Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Tahun 2023

Dari hasil tabel di atas jumlah penduduk menurut mata pencaharian yang terdiri dari laki-laki dan perempuan total keseluruhan sebanyak 5.230

Jiwa. Tabel di atas menunjukkan jumlah masyarakat Lampulo yang profesi sebagai seorang nelayan sebanyak 338 Jiwa. Maka dari itu masih ditambah adanya Pensiunan PNS dan TNI/Polri dengan total keseluruhan pekerjaan di Gampong Lampulo sebanyak 194 jiwa.

4.3 Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Banda Aceh

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh memiliki tugas utama apalagi kemampuan dalam mengelola dan mengawasi aset kelautan dan perikanan di Kota Banda Aceh. Tugas pokok tata usaha kelautan dan perikanan Kota Banda Aceh adalah menjalankan tugas dan menyelesaikan kewajiban pemerintah di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi tugas spesialis yang diberikan kepada kota yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas pokok dan fungsi Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

- a) Dinas kelautan dan perikanan memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditunjuk kepada daerah.
- b) Untuk menjalankan tugas pokok yang dimaksud Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 1. Pemberdayaan ekonomi para nelayan kecil
 2. Penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI)
 3. Penerbitan Izin Usaha Perikanan yang usahanya dalam satu kota

4. Pemberdayaan Usaha kecil dalam pembudidayaan ikan

5. Pengelolaan di sektor pembudidayaan ikan.

Adapun visi dan misi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh sebagai berikut:

- 1) Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh adalah Mewujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan yang tangguh mendukung terwujudnya Banda Aceh Gemilang dalam Bingkai Syariah.
- 2) Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh adalah Meningkatkan Pelayanan Aparatur Secara Optimal Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Kelautan & Perikanan.
- 3) Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh.

Tabel 7: Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh

No	Nama	Jabatan
1.	Dr. Drs. Samsul Bahri, M.Si	Kepala Dinas
2.	Amir Syarifuddin, S.Pi	Sekretaris
3.	Sajirun	Ka.Sub.bagian Program Dan Pelaporan
4.	Muhammad Fazri, SP	Ka.Sub.bagian Keuangan
5.	Marlina AR,SE.Ak	Ka.Sub.bagian Umum, Kepegawaian dan Aset
6.	Logi Lisandra, SP	Ka.Bidang Perikanan
7.	Plt. Erlia Andriana Adnan, S.St	Ka. Seksi Pemberdayaan Nelayan
8.	Plt. Irma Dewi Suryani, SP	Ka. Seksi Perikanan Budidaya

9.	Plt. Catur Satrio Digdoyo, SP	Ka. Seksi Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
10.	Heriansyah, SP,M,Si	KA. UPTD RPH
11.	Arief Setiawan MJ,S.TP,M,Si	KA. TU RPH

Sumber: Dinas Pangan,Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh 2023

4.4 Kondisi Masyarakat Nelayan Gampong Lampulo

Kegiatan sehari-hari para nelayan di gampong lampulo adalah ketergantungan hasil melaut, pekerjaan nelayan itu tersendiri tidak menjanjikan terhadap pendapatan yang membuat keluarga menjadi sejahtera. Nelayan dibagi menjadi 3 yaitu nelayan buruh, nelayan jurangan dan nelayan perorangan. Nelayan buruh ialah nelayan yang bekerja dengan menggunakan alat tangkap milik orang lain, nelayan jurangan atau di Aceh sering kita kenal sebutan Pawang Boat ialah seorang nelayan yang memiliki kapal dan alat tangkap sendiri yang mampu mengupah para pekerja nelayan, kemudian nelayan perorangan ialah nelayan yang mempunyai alat tangkap sendiri dan dalam melakukan pekerjaan tidak melibatkan nelayan lain.

Rata-rata penduduk gampong lampulo berprofesi sebagai nelayan buruh yang 1 kapal terdiri 10-25 orang, mungkin lebih dari 25 orang tergantung besar kapasitas sebuah kapal. Berdasarkan dari hasil penelitian melalui wawancara dan observasi, rata-rata nelayan yang berada di gampong lampulo sebagai nelayan buruh yang penghasilannya bergantung pada hasil tangkapan dan pembagian hasil di antara kelompok nelayan lainnya dengan nelayan jurangan/pawang laut sebagai pemilik kapal tersebut.

Oleh karena itu, dinas kelautan dan perikanan kota banda aceh untuk meningkatkan perekonomian para nelayan dengan memberikan bantuan baik moril dan materil dimulai dengan pembangunan sarana dan prasarana nelayan serta melakukan pelatihan bagi nelayan untuk menambah pengetahuan nelayan dan pendampingan nelayan dalam upaya pemasaran hasil tangkapan dalam rangka mensejahterakan nelayan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang berpedoman pada teori purwanto penyebab terjadinya penurunan hasil pendapatan nelayan sangat berdampak pada tingkat perekonomian nelayan gampong lampulo yaitu:

a. Terbatasnya kapasitas teknologi penangkapan seperti GPS yang merupakan alat yang dapat digunakan nelayan untuk menandai lokasi dimana ikan-ikan sering berkumpul, ini penyebab penurunan hasil pendapatan bersifat eksternal kalau mengenai kapasitas teknologi penangkapan, berikut wawancara dengan nelayan:

*“ Sekarang kan sudah jamannya modern jadi para nelayan dalam melaut masih menggunakan tradisi jaman dulu membuat unjam sejenis dedaunan seperti daun kepala dan daun pinang sebagai tempat alat bantu untuk menarik gerombolan ikan agar berkumpul di unjam tersebut. Jadi saya sebagai nelayan tidak sanggup membeli alat GPS dikarenakan pun sekarang bahan-bahan pokok sudah mahal seperti beras dan lainnya ”.*³²

b. Ketika kondisi alam tidak memungkinkan untuk melaut hal tersebut penyebab penurunan pendapatan karena kondisi alam yang baik membuat

³² Wawancara dengan bapak supriadi pada tanggal 09 juni 2023

nelayan bisa melaut sehingga menambah pendapatan nelayan, kemudian apabila cuaca buruk itu bisa membuat nelayan tidak bisa melaut berarti pendapatan nelayan berkurang, berikut hasil wawancara dengan nelayan:

*“Apalagi ketika musim cuaca buruk tidak bisa pergi untuk melaut, sebab kalau kita tetap melaut juga dengan kondisi cuaca buruk itu punya resiko besar, pemasukan kami dari nelayan itu dari hasil tangkapan ikan jadi kalau tidak melaut tidak ada pemasukan, jadi kami kalau tidak melaut ambil pinjaman sama pawang boat/pemilik kapal”.*³³

Maka dari itu, apabila cuaca buruk para nelayan tidak bisa melaut maka pendapatan nelayan berkurang serta utang nelayan pun bertambah dikarenakan kebutuhan sehari-hari rumah tangga para nelayan harus dipenuhi. Dalam hal ini untuk mengatasi itu nelayan harus mengambil pinjaman pada nelayan jurangan/pawang boat, berikut hasil wawancara dengan pawang boat:

*“Biasanya kalau tidak bisa melaut dikarenakan cuaca buruk para nelayan sering ambil pinjaman, mereka mengambil pinjaman untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk masalah pembayarannya biasanya saya potong gaji sedikit secara bertahap sampai lunas dari hasil tangkapan ketika melaut”.*³⁴

Apabila nelayan itu sejahtera tingkat kemiskinan pun menurun dalam hal itu juga untuk melihat tingkat kesejahteraan. Artinya, setiap orang memiliki berbagai perspektif tentang kehidupan, tujuan hidup, dan gaya hidup. Maka untuk melihat tingkat kesejahteraan nelayan gampong lampulo dengan teori badan koordinasi keluarga berencana nasional (BKKBN). Yang mana gampong lampulo tergolong dalam kategori keluarga sejahtera tahap satu.

³³ Wawancara dengan bapak darwis pada tanggal 09 juni 2023

³⁴ Wawancara dengan bapak Syammi pada tanggal 09 juni 2023

Berikut jawaban wawancara yang menjadi indikator kesejahteraan:

*“Keluarga saya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari sangat bergantung pada hasil melaut dan tidak ada pekerjaan lain kecuali melaut, apalagi anak-anak yang masih sekolah tidak untuk ikut bekerja seperti saya, istri saya hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga saja”.*³⁵

Berikut dipertegas juga oleh nelayan lainnya:

*“sekeluarga kami tidak ada pekerjaan kecuali nelayan, sedangkan istri saya palingan membantu saya dalam menjemur ikan tongkol untuk diolah menjadi suwir”.*³⁶

Di gampong lampulo rata-rata keluarga nelayan buruh tidak memiliki pekerjaan lain kecuali melaut demikian juga istri seorang nelayan bergantung pada penghasilan sang suami serta membantu suami dalam menjemur ikan tongkol untuk diolah menjadi suwir untuk dijual agar menambah pendapatan. Apabila nelayan buruh memiliki penghasilan lain dari melaut maka tergolong dari kategori keluarga sejahtera tahap dua, tetapi kenyataannya yang ada di lapangan dan hasil wawancara nelayan buruh di gampong lampulo masih tergolong keluarga sejahtera tahap satu.

Hasil Fakta dilihat dari wawancara berikut:

*“Saya bersama keluarga hanya tinggal dirumah bantuan tsunami dengan 3 orang anak tapi alhamdulillah dalam kondisi anak saya bersekolah kecuali anak saya paling kecil masih umur 4 tahun”.*³⁷

Dari hasil wawancara penulis menjelaskan dalam satu rumah bantuan tsunami yang ditinggal oleh 5 orang yaitu seorang nelayan dan istri nelayan

³⁵ Wawancara dengan bapak Abdul Aziz pada tanggal 09 juni 2023

³⁶ Wawancara dengan bapak Puteh Ali pada tanggal 09 juni 2023

³⁷ Wawancara dengan bapak Darwis pada tanggal 09 juni 2023

dengan 3 anaknya. Jika dilihat dari bangunan rumahnya dari hasil bantuan rumah tsunami merupakan rumah yang layak huni.

Hasil Fakta wawancara dilihat dari indikator kesehatan sebagai berikut:

“Syukur alhamdulillah sekarang kalau ada salah satu keluarga saya yang sakit masalah biaya tidak menjadi beban lagi karena sudah gratis kemudian bersyukur keluarga saya belum mengalami sampai sakit parah , palingan sakit biasanya seperti demam dan pilek.”³⁸

Masalah kesehatan yang dialami pada nelayan buruh di gampong lampulo adalah demam biasanya dan pilek. Biasanya mereka memilih berobat dirumah serta membeli obat di apotik terdekat dan ada juga beberapa nelayan lainnya yang memilih berobat ke puskesmas apabila sakit dikarenakan lebih praktis dan hemat biaya.

Maka dari hasil wawancara dilapangan yang terurai diatas baik dalam segi penghasilan,pekerjaan,tempat tinggal,pendidikan serta kesehatan jelas terlihat nelayan di gampong lampulo berdasarkan indikator perekonomiannya yang tergolong kategori keluarga sejahtera tahap satu.

4.5 Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Pemberdayaan Ekonomi Para Nelayan

Dengan melihat kondisi geografis Indonesia yang berstatus sebagai negara kepulauan dan daerah yang dikelilingi oleh pantai maka peran pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat nelayan sangatlah penting, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007

³⁸ Wawancara dengan bapak Puteh Ali pada tanggal 09 juni 2023

Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir pasal 63 yang menyatakan bahwa “Pemerintah dan Pemerintahan Daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha masyarakat pesisir melalui peningkatan usaha masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar dan aset ekonomi produktif lainnya.³⁹ Tentunya di Dinas Perikanan Dan Kelautan Kota Banda Aceh memiliki peranan yang cukup besar dalam pemberdayaan ekonomi para nelayan di Gampong Lampulo, maka dari itu dalam melaksanakan tugas sebagai pelaksana dari undang-undang yang telah dibuat harus sesuai yang tercantum didalamnya.

Peranan yang hendak di capai dari penyusunan rencana strategi dari aparatur di jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh mempunyai sudut pandang yang sama terhadap jalan pembangunan kelautan dan perikanan dalam kegiatan meningkatkan perekonomian masyarakat gampong lampulo menjadi sejahtera. Adapun peneliti menerapkan teori peran pemerintah yang dikemukakan oleh Iyas Yusuf yang memiliki 3 indikator sebagai peran yang dijalankan pihak dinas dalam meningkatkan perekonomian para nelayan demi terciptanya nelayan yang sejahtera.⁴⁰

4.5.1 Peran sebagai regulator

Sebagai regulator, peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh adalah menyiapkan arah agar terciptanya keseimbangan penyelenggaraan

³⁹ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir pasal 63

⁴⁰ Iyas, Yusuf. *Peran dan Fungsi Pemerintahan dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung : Humaniora, 2014 hlm.5.

melalui kebijakan yang dikeluarkan untuk memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh saat ini sudah menunjukkan perannya sebagai regulator, peran ini dapat dilihat dari regulasi terkait pemberdayaan peningkatan ekonomi masyarakat nelayan. Salah satu keseriusan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh dalam menjalankan peran sebagai regulasi mengenai pemberdayaan peningkatan ekonomi masyarakat nelayan dapat dilihat dari Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh yang berisi: Mewujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan yang tangguh mendukung terwujudnya Banda Aceh Gemilang dalam Bingkai Syariah dan Meningkatkan Pelayanan Aparatur Secara Optimal Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Kelautan & Perikanan.

Berikut wawancara dengan bapak Logi kepala bidang perikanan yang menjelaskan bahwa:

“Sebagai regulator peran dinas kelautan dan perikanan hanya untuk merangsang bukan untuk turun tangan langsung membantu masyarakat dalam menangkap ikan. tapi disini kami tugasnya mendukung masyarakat mensupport masyarakat dalam melaut. Nah untuk hal ini dari segi regulasi langsung ya itu belum ada, Jadi kami disini lebih ke aturan-aturan yang tidak langsung seperti aturan penggunaan jaring, penangkapan kapal-kapal ukuran besar tangkapannya harus diatas wilayah jalur, nah seperti-seperti itu yang ada.”⁴¹

Kemudian Bapak Miftach Tjut Adek selaku Panglima Laot Aceh dalam wawancaranya dengan penulis menjelaskan bahwa:

“mengenai aturan-aturan melaut itu ada yang dari pemerintah ada yang dari aturan adat, karna kita disini di Aceh ada yang namanya Panglima Laot. Nah apa fungsinya, kami disini sebagai tetua adat yang mempunyai

⁴¹ Wawancara dengan ka.bidang perikanan bapak Logi Lisandra pada tanggal 08 juni 2023

wewenang menjalankan hukum adat mengenai laut. Apa saja yang kami atur? Dari kapan saja boleh menangkap ikan, kapan tidak boleh menangkap, kalau tangkap ikan pakai alat apa, alat ini boleh tidak. Terus kami juga kalau ada permasalahan-permasalahan yang ada di laut atau diantara nelayan, kami yang selesaikan, kami yang dudukkan. Oh ini masalahnya berat, nanti kami kasih denda, kasih apa itu hukuman. Yang pastinya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan dalam hukum adat laut. Kemudian kalau ada bantuan ataupun ada pemberitahuan dari dinas ataupun pemerintah itu biasanya ke kami dulu dikasih tau, kalau ada bantuan kepada siapa dikasih, itu mereka tanya sama saya, nanti saya yang memberi saran kepada siapa saja dikasih bantuannya, nelayan mana yang harus dibantu, yang seperti apa, apa saja persyaratannya, kira-kira apa yang dibutuhkan para nelayan, jadi walaupun ada bantuan kita harapkan benar-benar yang memang bisa dipakai dan digunakan sesuai kemampuan nelayan sehingga bantuan itu pun bermanfaat dan nelayan juga merasa terbantu.”

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh sudah melaksanakan perannya dengan baik, dapat dilihat dari adanya regulasi yang diterbitkan baik secara langsung maupun tidak langsung dan adanya koordinasi dengan unsur pemerintahan adat setempat yaitu Panglima Laot. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menyukseskan program pembangunan perikanan dan kelautan, meningkatkan kesejahteraan nelayan dan mendorong peningkatan ekonomi masyarakat nelayan khususnya di Gampong Lampulo.

4.5.2 Peran sebagai dinamisator

Peran sebagai dinamisator yang dimaksud adalah menggerakkan masyarakat agar berpartisipasi ketika menghadapi kendala-kendala yang terjadi di lapangan saat proses pembangunan berlangsung, hal ini dilakukan demi mendorong dan memelihara dinamika pembangunan khususnya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh melakukan perannya sebagai dinamisator

melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan berkelanjutan kepada masyarakat. Pemberian bimbingan dapat diwujudkan dengan mengadakan sosialisasi maupun penyuluhan yang difasilitasi oleh tim penyuluh ataupun badan tertentu sebagai mitra untuk memberikan sosialisasi, penyuluhan ataupun pembinaan kepada masyarakat nelayan

Menurut peneliti, kajian ini memberi makna bahwa untuk menjalankan roda pemerintah Kota Banda Aceh sebagai dinamisator di Jajaran Dinas Kelautan Perikanan Kota Banda Aceh sebagai pihak yang mampu menggerakkan partisipasi masyarakat nelayan dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang meningkatkan pengetahuan bagi para nelayan yang meningkatkan pengetahuan bagi para nelayan.

Hasil wawancara di lapangan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Dinas Kelautan Perikanan Kota Banda Aceh peran sebagai dinamisator dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan pelatihan

Dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan nelayan Pihak dari Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Banda Aceh dalam peran pemberdayaan ekonomi nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan yaitu menjalankan strategi pengadaan pelatihan guna menciptakan pengetahuan terhadap keterampilan yang baru dan pembekalan inovasi mengenai teknologi penangkapan.

Berikut wawancara dengan pegawai bidang perikanan:

*“Peran dinas dalam pemberdayaan ekonomi nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan maka dari itu kami menerapkan sosialisasi pelatihan terhadap pengetahuan nelayan dan juga keterampilan supaya nelayan memahami dalam pengelolaan usaha nelayan, dan meningkatkan produksi dalam akses pemasaran, patut kita sadari nelayan perlu dibina dan pembekalan dengan inovasi teknologi penangkapan supaya nantinya nelayan bisa mencari ikan dengan jarak lebih jauh untuk mendapatkan hasil tangkapan yang lebih melimpah kemudian pendapatan mereka pun makin bertambah”.*⁴²

Cuaca buruk di laut selama beberapa bulan terakhir membuat nelayan menjadi sulit sehingga hasil tangkapan sedikit. Maka untuk hal ini dinas mencoba mengajak para nelayan untuk ikut pelatihan dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat yang bisa menghasilkan tambahan penghasilan bagi para nelayan. Misalnya nelayan dapat memperbaiki sendiri mesin kapal yang rusak tanpa membawanya ke bengkel (sehingga mereka dapat membuka usaha bengkel dan secara tidak langsung penghasilan nelayan dapat bertambah) nelayan dapat mengembangkan budidaya ikan air tawar dan menawarkannya ke pasar, atau mengisi waktu senggangnya untuk membuat kerajinan kulit kerang yang mudah didapatkan di tepi pantai sehingga dapat menjadi barang yang memiliki nilai tinggi, nilai imajinatif dan biaya penjualan yang tinggi.

Sosialisasi ini dilaksanakan di sekitar PP lampulo yang pada intinya memberi wawasan untuk meningkatkan penghasilan nelayan terutama selama terpaut cuaca yang sangat buruk atau hambatan lainnya. Mengenai anggota pelatihan ini diperlukan dari semua nelayan di PP lampulo. Namun demikian,

⁴² Wawancara dengan ka.bidang perikanan bapak Logi Lisandra pada tanggal 08 juni 2023

ini tidak berjalan seperti yang diharapkan. Berikut wawancara dengan nelayan:

“Dalam hal program dari dinas terhadap pelatihan tersebut saya kurang tau, tidak tau mungkin ada diadakan mereka namun saya pribadi tidak pernah tau tentang apa pun masalah pelatihan, kalau masalah meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan, itu usaha saya dan kelompok nelayan.”⁴³

Berdasarkan wawancara di atas, ada nelayan yang mengetahui adanya pelatihan dan ada juga nelayan yang tidak mengetahuinya. Jelas disini bahwa ketidakmampuan dan kekurangan dalam pelaksanaan program pelatihan adalah karena tidak adanya komunikasi antara pihak dinas dan nelayan sehingga kedepan persepsi ini akan berkelanjutan, maka itu pelatihan yang diadakan oleh dinas kapanpun tidak pernah berjalan sesuai harapan (memperluas informasi dan mensejahterakan nelayan) dan akibat program pelatihan nelayan tidak menjamin kesejahteraan dengan alasan tidak semua nelayan berpartisipasi dalam program pelatihan yang diadakan oleh pihak dinas sehingga memakan biaya, waktu dan tenaga.

4.5.3 Peran sebagai fasilitator

Peran pemerintah Kota Banda Aceh sebagai fasilitator menciptakan suasana dan kondisi yang memudahkan untuk menghubungkan berbagai kepentingan masyarakat nelayan dan memaksimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator pemerintah Kota Banda Aceh ikut serta membantu dan mendampingi masyarakat nelayan dalam bentuk pelatihan, pendidikan, peningkatan kemampuan, serta dalam bidang pendanaan atau permodalan

⁴³ Wawancara dengan bapak Puteh Ali pada tanggal 09 juni 2023

melalui pemberian bantuan permodalan kepada masyarakat nelayan. Salah satu bentuk peran Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Banda Aceh selaku fasilitator adalah dengan menjamin keselamatan nelayan ketika berlayar untuk mencari hasil tangkapan, memfasilitasi nelayan dengan pelatihan, pendidikan dan pembinaan demi meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan di Gampong lampulo.

1. Pembuatan Kartu Nelayan

Pembagian kartu nelayan merupakan salah satu cara yang dipilih pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Penerbitan kartu nelayan dapat menjadi sarana bagi dinas/instansi pemerintah sekaligus memberikan arahan dan bantuan penguatan usaha kepada nelayan agar lebih terarah. Kartu nelayan merupakan salah satu apresiasi pemerintah melalui kementerian kelautan dan perikanan atas profesi nelayan dengan dikeluarkannya peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 16 tahun 2016.

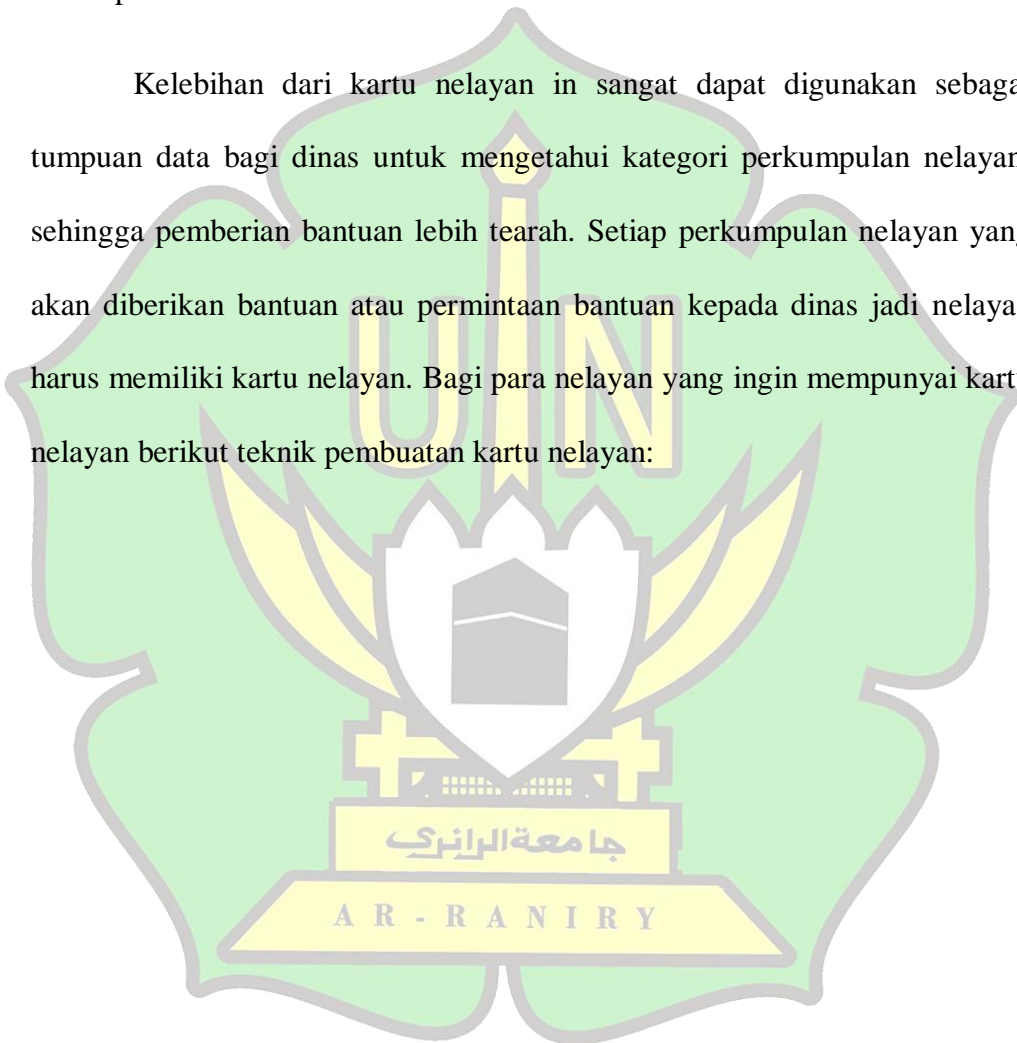
Gambar 2 kartu nelayan



Sumber: dinas kelautan dan perikanan banda aceh

Kartu nelayan merupakan kartu identitas profesi bagi penduduk Indonesia yang melaksanakan aktivitas usaha penangkapan ikan yang mencakup dari nahkoda kapal, anak buah kapal, pemilik kapal yang langsung mengikuti kegiatan penangkapan ikan dan tidak menggunakan kapal untuk mendapatkan ikan.

Kelebihan dari kartu nelayan ini sangat dapat digunakan sebagai tumpuan data bagi dinas untuk mengetahui kategori perkumpulan nelayan, sehingga pemberian bantuan lebih terarah. Setiap perkumpulan nelayan yang akan diberikan bantuan atau permintaan bantuan kepada dinas jadi nelayan harus memiliki kartu nelayan. Bagi para nelayan yang ingin mempunyai kartu nelayan berikut teknik pembuatan kartu nelayan:



Gambar 3: Alur pembuatan kartu nelayan:



Sumber: Dinas kelautan dan perikanan kota banda aceh 2023

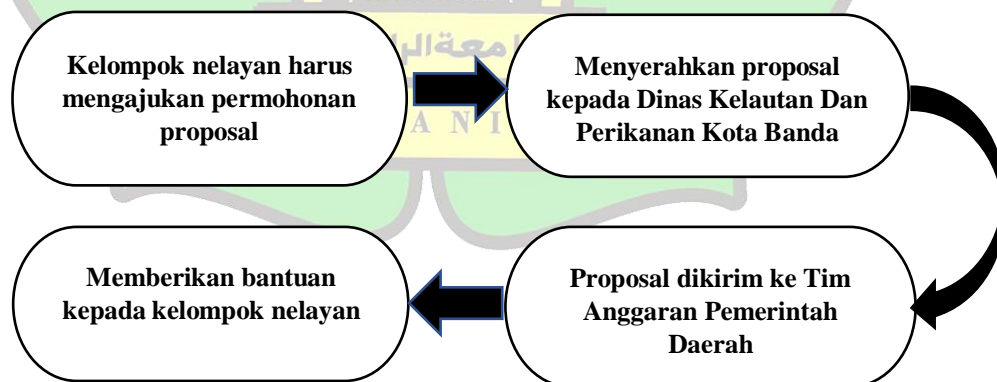
Kartu nelayan merupakan wujud dari pembentukan salah satu kebutuhan dalam pengembangan kelompok usaha bersama (KUB) serta perangkat pemerintah dalam melaksanakan kebijakan dan memulai langkah dalam pemberdayaan ekonomi para nelayan lebih mandiri. Walaupun dinas sebagai pendamping telah memberitahukan tata cara pembuatan kartu nelayan, masih saja ada nelayan yang belum mengetahui administrasi pembuatan kartun nelayan. Hasil wawancara dengan nelayan:

“Masalah pembuatan kartu nelayan saya kurang paham tapi saya sudah punya kartu nelayan itu kartu yang saya dapatkan diurus sama panglima laot.”⁴⁴

Dari fakta wawancara di atas, terlihat bahwa para nelayan masih kurang paham terhadap pembuatan kartu nelayan maka dari situ kita lihat bahwa pentingnya pelatihan yang diadakan oleh dinas untuk paham masalah pengurusan pembuatan kartu nelayan. Namun sebenarnya nelayan kurang memahami dalam hal pengetahuan.

Apabila kelompok nelayan yang sudah mempunyai kartu nelayan, maka kelompok nelayan dapat mengajukan permohonan bantuan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan kota banda aceh. Dengan syarat nelayan yang ingin mengajukan permohonan bantuan harus berdasarkan kelompok bukan perorangan karena dinas perikanan bertujuan untuk mensejahterakan kelompok nelayan bukan nelayan perorangan. Berikutnya adalah akomodasi permohonan bantuan dan pemberian bantuan untuk nelayan, sebagai berikut:

Gambar 4 Proses mengajukan bantuan



⁴⁴ Wawancara dengan bapak Puteh Ali pada tanggal 09 juni 2023

Seperti terlihat pada gambar di atas, pihak dinas tersebut memiliki prosedur tersendiri dalam memberikan bantuan kepada kelompok nelayan. Secara khusus, kelompok nelayan mengajukan usulan beserta rencana anggaran biaya (RAB) berdasarkan dengan permohonan yang dibutuhkan, dengan melampirkan surat keterangan dari kepala desa, surat dari camat, dan Panglima Laot.

Selain itu, usulan tersebut disampaikan kepada dinas perikanan dan perikanan untuk mengecek kebenaran usulan usulan tersebut untuk disampaikan kepada kelompok perencanaan keuangan pemerintah daerah (TAPD) di tingkat kota banda aceh, dengan asumsi permohonan usulan tersebut disetujui dan bantuan akan diberikan kepada kelompok nelayan yang sudah mengajukan permohonan bantuan. Berikut adalah hasil wawancara dengan pegawai terkait dengan strategi pemberian bantuan kepada kelompok nelayan:

“Sementara sekelompok nelayan mengajukan permohonan bantuan, bantuan tersebut terlebih dahulu memeriksa keabsahan dokumen, permohonan tersebut berdasarkan kebutuhan atau tidak, apabila disetujui, kemudian pihak dinas akan membeli suatu barang melalui pihak ke tiga, khususnya kontraktor untuk diserahkan bantuan kepada kelompok nelayan dengan menandai serah terima dan perjanjian hibah Provinsi serta kebenaran kelompok nelayan menyatakan bahwa mereka akan memanfaatkan dan tidak menukar bantuan ini dan ada pengamatan dan penilaian oleh inspektorat dan badan keuangan (BPK)”.⁴⁵

Hasil wawancara di atas, cenderung diduga bahwa pihak dinas tidak sepenuhnya langsung menyetujui permohonan bantuan bahkan permohonan bantuan tidak semua disetujui, dengan alasan bahwa bantuan yang diajukan

⁴⁵ Wawancara dengan ka.bidang perikanan bapak Logi Lisandra pada tanggal 08 juni 2023

tidak sesuai dengan kebutuhan nelayan dan bantuan yang pernah diberikan masih layak pakai. Dalam pemberian bantuan tersebut melalui pihak ketiga tepatnya kontraktor hal ini pihak dinas tidak lepas tangan, tetapi dilakukan pengecekan dan penilaian dari pihak dinas terhadap bantuan tersebut tidak lepas dari pengawasan pihak inspektorat dan badan pemeriksaan keuangan(BPK).

Peran dinas kelautan dan perikanan dalam meningkatkan perekonomian para nelayan dengan memberikan bantuan kepada kelompok nelayan biasanya berupa barang. Berikut wawancara terhadap pemberian bantuan kepada kelompok nelayan:

“Terkait dengan keberlangsungan hidup para nelayan sangat kami perhatikan sebagai peranan dinas untuk memberikan bantuan kepada kelompok nelayan agar meningkatkan perekonomian serta terciptanya kesejahteraan bagi para nelayan. Pihak dinas memberikan bantuan biasanya berupa alat tangkap ikan(pukat), radio komunikasi, pancing ikan, jala, GPS,kapal,bak fiber ikan,baju pelampung, jaring 3 lapis(trammel net),lampu kapal.”⁴⁶

Dari hasil wawancara di atas, dengan adanya bantuan yang diberikan oleh pihak dinas kelautan dan perikanan dapat berguna bagi nelayan untuk memudahkan mencari ikan saat melaut dengan adanya bantuan fasilitas yang berupa alat tangkap, bak fiber ikan, GPS dapat meningkatkan penghasilan para nelayan dan meningkatkan perekonomian nelayan. Bantuan tersebut murni diberikan bukan dari pengajuan bantuan dari pihak kelompok nelayan. berikut ini adalah hasil wawancara dengan nelayan dalam hal bantuan sebagai berikut:

⁴⁶ Wawancara dengan ka.bidang perikanan bapak Logi Lisandra pada tanggal 08 juni 2023

“Masalah bantuan dari dinas saya tidak tahu siapa yang diberikan bantuan, tapi dari kelompok saya tidak pernah menerima bantuan apapun dari dinas tapi kalau kami butuh sesuatu keperluan kami minta pada toke bangku(jurangan kapal). Tapi kalau ada diberikan alhamdulillah kalau tidak ada diberikan ya sudah tidak apa-apa karena saya makan dengan uang hasil tangkapan dan bagi hasil dari toke bangku(jurangan kapal)”.⁴⁷

Dari hasil wawancara dengan nelayan menjelaskan bahwa sebagian para nelayan belum pernah mendapatkan bantuan dari pihak dinas tersebut, namun sebagian nelayan mengetahui adanya bantuan tapi tidak mengetahui kelompok nelayan mana yang mendapatkan bantuan tersebut. Dari sini kita lihat betapa kurang keterbukaan informasi mengenai pemberian bantuan kepada kelompok nelayan.

2. Bantuan logistik

Pemerintah kota banda aceh melalui dinas kelautan dan perikanan juga memberikan bantuan berupa logistik kepada kelompok-kelompok nelayan di gampong lampulo yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan, bantuan yang telah diberikan oleh pihak dinas kelautan dan perikanan berupa fasilitas yang sangat dibutuhkan oleh nelayan yaitu alat tangkap, fiber cool box, mesin kapal dan alat-alat lainnya.

Peran sebagai fasilitator pihak dinas kelautan dan perikanan kota banda aceh memberikan bantuan berupa materi ini bertujuan agar meningkatkan perekonomian nelayan di gampong lampulo, apabila perekonomian nelayan menjadi meningkat maka kesejahteraan nelayan akan juga meningkat. Akan tetapi pemberian bantuan masih belum merata terhadap

⁴⁷ Wawancara dengan bapak Abdul Aziz pada tanggal 09 juni 2023

penyaluran bantuan, tapi bantuan yang diberikan oleh pihak dinas ini sangat membantu nelayan dalam meningkatkan pendapatannya.

Berikut adalah hasil wawancara dengan pegawai terkait bantuan logistik untuk nelayan:

“Bantuan yang diinginkan oleh para nelayan seperti alat tangkap, fiber cool box, mesin kapal dan alat-alat lainnya itu nelayan harus mengajukan permohonan bantuan, bantuan tersebut terlebih dahulu memeriksa keabsahan dokumen, permohonan tersebut berdasarkan kebutuhan atau tidak, apabila disetujui, kemudian pihak dinas akan membeli suatu barang melalui pihak ke tiga, khususnya kontraktor untuk diserahkan bantuan kepada kelompok nelayan dengan menandai serah terima dan perjanjian hibah Provinsi serta kebenaran kelompok nelayan menyatakan bahwa mereka akan memanfaatkan dan tidak menukar bantuan ini dan ada pengamatan dan penilaian oleh inspektorat dan badan keuangan (BPK)”⁴⁸

Dari berbagai informasi diatas dapat kita simpulkan bahwa dinas kelautan dan perikanan kota banda aceh telah menjalankan perannya sebagai fasilitator dengan mengadakan berbagai upaya demi menunjang peningkatan perekonomian para nelayan khususnya di gampong lampulo.

3. Sarana dan prasarana

Upaya dalam pengoptimalkan sumber hasil tangkapan di pelabuhan perikanan pantai (PPP) lampulo, alokasi kebutuhan terhadap sarana diharapkan dapat menjadi acuan pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perikanan di pelabuhan perikanan pantai (PPP) lampulo. Maka dari itu pihak dinas mengoptimalkan strategi dalam membangun sarana dan prasarana guna mempermudah nelayan dalam memasarkan ikan.

⁴⁸ Wawancara dengan ka.bidang perikanan bapak Logi Lisandra pada tanggal 08 juni 2023

Berikut adalah hasil wawancara dengan pegawai terkait dengan strategi dalam membangun sarana dan prasarana sebagai berikut:

*“Masalah sarana dan prasarana salah satu program yang sudah terealisasi berupa program pembangunan sarana dan prasarana, yaitu pembangunan dermaga, gudang pendingin ikan, pembangunan gudang es balok, pembangunan balai untuk nelayan, dan lain-lain. Dalam rangka kelancaran kegiatan nelayan, dimana program bantuan ini untuk membantu pekerjaan para nelayan”.*⁴⁹

Hasil dari wawancara nelayan terhadap penerapan program yang dilakukan oleh dinas sebagai berikut:

*“Mengenai pengembangan dermaga, balai masyarakat gampong, dan bangunan fisik memang benar dibangun sama pihak dinas seperti yang sudah terlihat sekarang. Bahkan, itu sangat membantu kami para nelayan dalam kegiatan di darat dan di laut”.*⁵⁰

Gambar 5 bangunan pasar ikan Lampulo



4. Bantuan kartu asuransi nelayan

Program lain dari dinas kelautan dan perikanan memberikan bantuan berupa kartu asuransi nelayan yang sangat berguna bagi nelayan buruh.

⁴⁹ Wawancara dengan ka.bidang perikanan bapak Logi Lisandra pada tanggal 08 juni 2023

⁵⁰ Wawancara dengan bapak Puteh Ali pada tanggal 09 juni 2023

Dengan demikian, KKP (kementerian kelautan dan perikanan) di bawah dukungan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia menerbitkan kartu asuransi bagi para nelayan di seluruh indonesia. Program ini sangat penting untuk program perlindungan para nelayan, khususnya BPAN (bantuan premi asuransi bagi nelayan). BPAN bermaksud memberikan jaminan kepada nelayan buruh meliputi pertanggungan ganti rugi atas risiko meninggal dunia, cacat tetap, dan biaya pengobatan.

Gambar 6 Kartu Asuransi Nelayan



Kriteria untuk penerima bantuan asuransi nelayan :

- 1) Nelayan buruh atau nelayan tradisional
- 2) Memiliki kartu nelayan
- 3) Usia maksimal 65 tahun
- 4) Ukuran boat maksimal 10GT
- 5) Tidak pernah mendapatkan bantuan program asuransi dari dinas
- 6) Persetujuan atas keadaan yang dinyatakan dalam buku polis asuransi (kontrak perjanjian yang tertulis antara kedua pihak dalam asuransi).

Persyaratan yang harus dipenuhi:

- 1) mengisi form (AN-1 dan AN-2)
- 2) fotocopy kartu nelayan dan kartu keluarga
- 3) fotocopy buku tabungan (jika ada)
- 4) Ahli waris yang ditunjuk wajib melampirkan sesuai dengan poin 2 dan 3.

Keuntungan dari bantuan asuransi nelayan adalah:

- 1) santunan kecelakaan yang disebabkan oleh aktivitas saat melaut menyebabkan kematian mendapatkan bantuan sejumlah 200 juta
- 2) santunan kecelakaan yang disebabkan oleh aktivitas saat di darat menyebabkan kematian mendapatkan bantuan sejumlah 160 juta.
- 3) Santunan kecelakaan saat aktivitas melaut yang menyebabkan cacat tetap mendapatkan santunan berjumlah 100 juta.
- 4) Santunan biaya pengobatan mendapatkan bantuan berjumlah 20 juta.

Program ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam yang sudah tersebar hingga 34 provinsi seluruh Indonesia. Berikut hasil wawancara dengan salah satu nelayan:

“Terkait dengan Kartu asuransi nelayan itu betul adanya dan saya pun sudah mempunyai kartu asuransi nelayan tetapi saya tau juga apakah santunan itu di laksanakan sesuai kebijakan karena belum terjadi kepada saya semoga dijauhkan dari musibah di darat maupun di laut. Saya dengar-dengar dari nelayan lain yang mengalami musibah ada diberikan santunan tersebut.”⁵¹

Hasil dari wawancara di atas bahwa pihak dinas sudah melaksanakan program pembagian kartu asuransi nelayan yang sudah di terima kepada

⁵¹ Wawancara dengan bapak Puteh Ali pada tanggal 09 juni 2023

nelayan semoga dengan adanya kartu asuransi nelayan ini berguna untuk di masa yang akan datang.

4.6 Faktor Pendukung dan Penghambat yang Mempengaruhi Pemerintah dalam Pemberdayaan Ekonomi Para Nelayan

Dalam hal meningkatkan perekonomian para nelayan, pemerintah memiliki unsur-unsur pendukung yang mempengaruhi pekerjaan untuk membina lebih dari sebelumnya, dan memiliki faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pekerjaan dan bahkan bisa saja berhenti dalam menjalankan prosedurnya sebagai berikut:

a) Faktor pendukung secara internal

Pegawai yang mencukupi untuk mendukung kinerja oleh dinas untuk melayani dan mengatasi masalah nelayan. Hal ini harus memiliki pegawai yang memadai. Untuk memperlancar pekerjaan dinas kelautan dan perikanan kota banda aceh memiliki jumlah pegawai yang cukup terhadap bidang sesuai dengan kebutuhan masing-masing dalam pekerjaan yang akurat.

Kebijakan dari dinas perikanan dan kelautan banda aceh menjadi salah satu faktor pendukung dalam pemberdayaan ekonomi nelayan karena dengan adanya peraturan-peraturan yang dibuat serta mendapat dukungan dari dinas akan dapat menambah pendapatan masyarakat nelayan Gampong Lampulo. Kebijakan yang ada salah satunya dengan adanya pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan kepada para nelayan di Gampong Lampulo. Yang mana sesuai dengan hasil penelitian pemberdayaan ekonomi para nelayan di

gampong lampulo dengan menggunakan strategi pemberdayaan yaitu mengembangkan ekonomi masyarakat yang memerlukan kesinambungan antara pemerintah dan masyarakat. Pemberdayaan ekonomi ini dilakukan dengan tujuan menumbuh kembangkan keterampilan serta pendapatan para nelayan meningkat agar dapat menyimpan modal untuk masa tua akan mendatang.

b) Faktor pendukung secara eksternal

Relasi kerja yang baik, relasi kerja yang baik merupakan variabel pendukung bagi dinas, dengan alasan dinas tidak dapat bekerja sendiri, sehingga adanya hubungan kerja yang baik antara dinas, camat, kepala desa (keuchik) dan panglima laot membuat pekerjaan menjadi lebih lancar.

Selanjutnya lokasi tempat yang sangat strategis dikarenakan dinas kelautan dan perikanan kota banda aceh terletak di jl.tgk dikandang gampong pande kec. kuta raja serta mudah dijangkau oleh para nelayan juga dekat dengan ppp lampulo dengan lokasinya yang tidak terlalu jauh sehingga mendukung kinerja dinas lebih cepat ketika pihak berwenang berkunjung ke perikanan lampulo pelabuhan, serta nelayan saat mengunjungi kantor dinas perikanan dan kelautan banda aceh.

c) Faktor penghambat secara internal

- 1) Keterbatasan sumber daya finansial, dengan keterbatasannya maka sangat sulit untuk meningkatkan program pembangunan fisik dan nonfisik. Jadi untuk saat ini walaupun keterbatasan biaya pembangunandan

program tetap dijalankan baik dari pemeliharaan sarana dan prasarana serta peningkatan pengetahuan para nelayan.

2) Fasilitas yang tidak mencukupi, komputer yang tidak cukup serta ruang tata kerja yang tidak beraturan.

3) Tingkat pendidikan masyarakat nelayan rendah, maka menjadi faktor penghambat bagi dinas dalam mengadakan program-program serta sosialisasi dengan masyarakat nelayan di gampong lampulo. Sebab nelayan hanya bisa mengkritik apa yang dibuat oleh dinas tanpa tahu menahu apa yang menjadi kendala bagi dinas.

d) Faktor penghambat secara eksternal

Minimnya partisipasi para nelayan, nelayan yang sulit untuk diajak kolaborasi ini tentunya akan menjadi penghambat kinerja apabila semua nelayan hadir di dalam program yang dilakukan oleh dinas seperti membuat pelatihan, andai saja semua nelayan mengikuti pelatihan tentunya nelayan yang memiliki pendidikan rendah bukan menjadi faktor penghambat lagi, karena nelayan sudah paham untuk pengelolaan yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan.

Adapun yang menjadi kendala bagi nelayan dalam berpartisipasi, berikut wawancara dengan nelayan:

“Masalah program yang dijalankan pemerintah bukannya saya tidak menjunjung tinggi program dari dinas tetapi saya sangat bergantung kepada nelayan jurangan(toke kapal) kalau saya ikut sosialisasi, saya cuma dapat ilmu bukan uang yang saya dapatkan, sekarang bukan

*masalah wawasan tapi bagaimana saya menghidupi kebutuhan sehari-hari kelurga saya dari hasil tangkapan melaut. Seandainya suatu hari saya tidak pergi ke laut, saya ikuti sosialisasi walaupun saya tidak mendapatkan uang di hari tersebut”.*⁵²

Menurut hasil wawancara tersebut di atas alasan nelayan tidak ikutsertaan dalam sosialisasi sebab mempengaruhi kehidupan sehari-hari dari hasil tangkapan yang diperoleh melaut dipimpin langsung toke kapal. Selain itu nelayan percaya bahwa dengan mengikuti pelatihan sosialisasi mereka hanya akan mendapatkan pengetahuan dan tidak menghasilkan uang. Bagaimanapun hal yang berbeda menunjukkan cara nelayan tidak bisa mengikuti sosialisasi mengingat fakta bahwa nelayan bekerja di bawah kendali toke kapal.

⁵² Wawancara dengan bapak Darwis pada tanggal 09 juni 2023

BAB V

PENUTUP

4.4 Kesimpulan

Mengingat tujuan penelitian dan hasil penelitian, jadi dapat disimpulkan yaitu: Peran Dinas Kelautan dan Perikanan kota banda aceh dalam meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan di Gampong lampulo telah berjalan dengan baik sesuai dengan peran yang di jalankan melalui 3 indikator peran yaitu, peran sebagai regulator, dinamisator serta fasilitator. Hal ini dapat diperhatikan dari adanya peraturan yang dibuat oleh Dinas Kelautan dan Perikanan yang kolaborasi dengan Panglima Laot sebagai mitra kerja dari pemerintah terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan dan penyediaan sarana dan prasarana seperti TPI Lampulo yang pendukung jalannya usaha penjualan ikan dan sejumlah pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan kota banda aceh. Dengan adanya bantuan tersebut masyarakat nelayan di Gampong lampulo amat terbantu perekonomian masyarakat pun meningkat dari tahun ke tahun.

Dalam melaksanakan peranan mempunyai faktor pendukung dan penghambat yang dialami oleh pihak dinas kelautan dan perikanan kota banda untuk meningkatkan perekonomian para nelayan. Ada beberapa faktor pendukungnya ialah pegawai yang memandai, kinerja yang baik, dan lokasi tempatnya sangat strategis. Sedangkan faktor penghambatnya ialah

anggaran dana yang terbatas, tingkat pendidikan yang masih kurang, fasilitas yang kurang memadai dan kurang keikutsertaan para nelayan.

4.5 Saran

Kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Banda Aceh, dalam menjalankan prosedur sebaiknya musyawarah dengan nelayan atau mengikutsertakan nelayan dalam merencanakan strategi, dan mendekatkan nelayan agar dapat mengetahui apa yang diharapkan nelayan, sehingga pelaksanaannya strategi bekerja seperti yang diharapkan berhasil dan produktif.

Kepada dinas kelautan dan perikanan kota banda aceh agar lebih cepat dan menanggulangi masalah serta cepat serta imajinatif dalam mencari solusi dalam mengatasi faktor penghambat dalam meningkatkan perekonomian para nelayan serta mengembangkan yang membantu kinerja pihak dinas dalam upaya peningkatkan perekonomian dan kesejahteraan nelayan.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abu Ahmadi. *Psikologi Sosial*, Jakarta. Rineka Cipta.2007.
- Arif Satria. *Pengantar sosiologi masyarakat pesisir*.Jakarta.Yayasan Pustaka Obor Indonesia.2015.
- Basrowi, Suwandi. *Memahami penelitian kualitatif*.Jakarta. PT. Rineka Cipta.2008.
- David Barry. *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*.Jakarta. CV Rajawali Press. 1984.
- Inu Kencana Syafie. *Pengantar ilmu pemerintahan*. Jakarta.Refika Aditama.2010.
- Iyas, Yusuf. *Peran dan Fungsi Pemerintahan dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat*,Bandung.Humaniora.2014.
- M. Daud Silalahi. *Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia dan Implementasinya Secara Regional*.Jakarta. Sinar Harapan. 1992.
- Miftah Thoha. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*.Jakarta .PT. Raja Grafindo Persada.2003.
- Moleong J. L. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*.Bandung.PT Remaja Rosdakarya. Bandung.2007.
- Munadjat Danusaputro. *Tata Lautan Nusantara Dalam Hukum dan Sejarahnya*.Bandung.Ekonomi.1980.
- Nasution S. *Metode penelitian Naturalistik kualitatif*.Bandung.tarsiti.1988.
- Nuramelia. *Defenisi pemerintah dan pemerintahan*.Jakarta.PT.Rineka Cipta.2014.
- Rianto Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*.Jakarta.Granit.2004.
- R. Sutyo Bakir. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Tangerang.Karisma Publishing Group.2009.
- Soejono Soekamto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Rajawali Press.2002
- Soejono Soekanto. *Kamus Sosiologi*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.1985.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*.Bandung. Alfabeta. 2009.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya. 2007.

Sutarto. *Dasar-dasar Organisasi*. Yogyakarta. UGM Press. 2009.

Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta. 2012.

Widjaja, HAW. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2003.

W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta. PN. Balai Pustaka. 1985.

Skripsi dan Jurnal

Edi Sugarto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*. Bandung. PT Ravika Adimatama. Cet Ke-1. 2005.

Michael Mamentu. *Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan Tangkap di Kota Manado*. Jurnal. Universitas Sam Ratulangi. Vol 2. 2005.

Nurhayati Botutihe. *Skripsi. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*. Gorontalo. Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Gorontalo. 2016.

Refika Aditama. *Sosial dan Pekerja Sosial*. Bandung. Ptrevika Aditam. Cet Ke 1. 2005.

Rosni. *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara*. Jurnal Vol. 9 No. 1. Pendidikan Geografi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Medan. 2017.

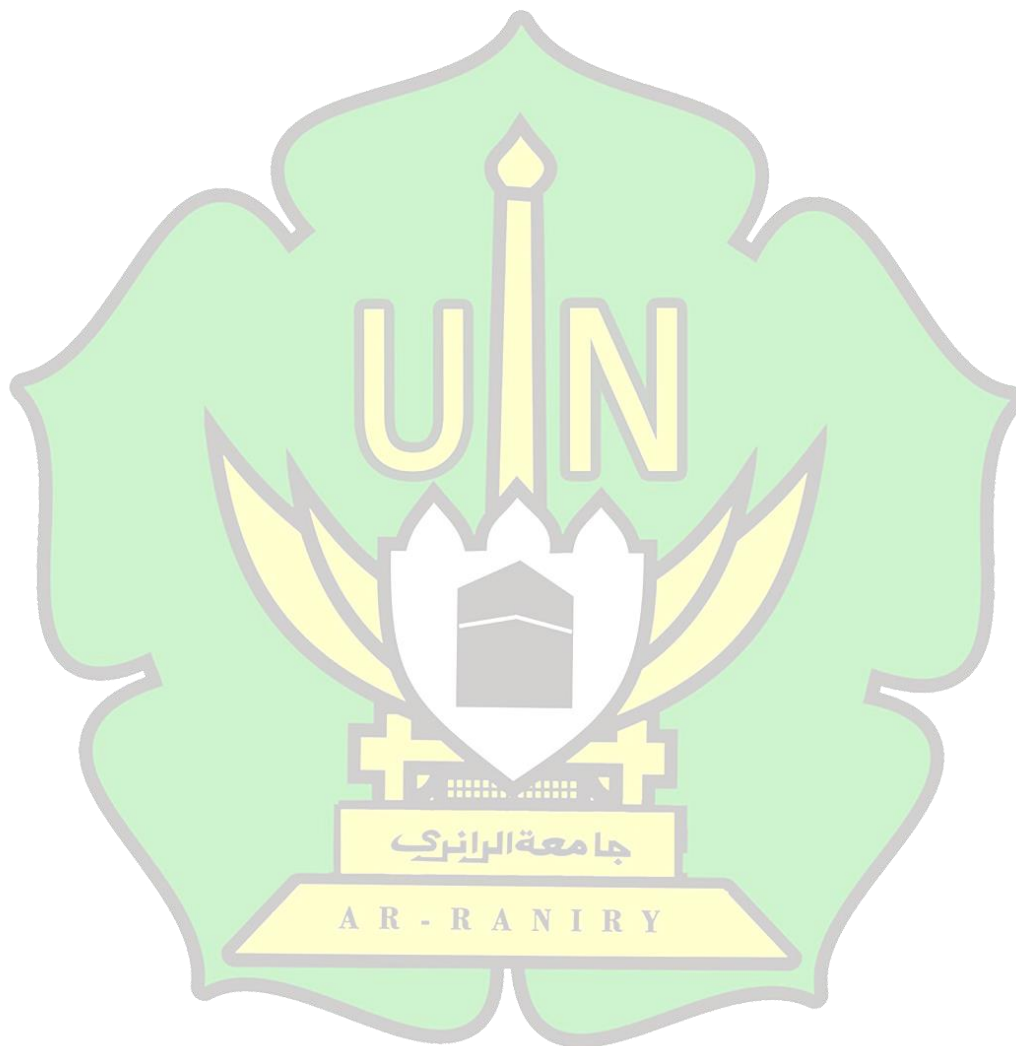
Sumber undang-undang

Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 *Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam*.

Internet

<https://dkp.acehprov.go.id/index.php/profil/read/2016/10/12/116/pelabuhan-perikanan-lampulo.html> diakses pada tanggal 24 Mei 2023 pukul 16.20 WIB

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh diakses dari <https://aceh.bps.go.id/indicator/12/55/1/jumlah-penduduk.html> diakses pada tanggal 23 Mei 2023 pada pukul 16.49 WIB.





SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 749/Un.08/FISIP/Kp.07.6/03/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
 b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
 12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 Nopember 2022.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Politik pada tanggal **11 Januari 2023**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Saudara :

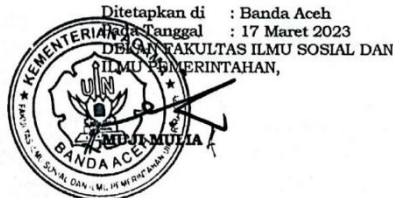
- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Eka Januar, M.Soc.Sc. | Sebagai pembimbing I |
| 2. Arif Akbar, MA. | Sebagai pembimbing II |

Untuk membimbing skripsi :

Nama : Mohd Rizki
 NIM : 170801107
 Program Studi : Ilmu Politik
 Judul : Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Para Nelayan (studi Kasus Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)

KEDUA : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



Ditetapkan di : Banda Aceh
 Tanggal : 17 Maret 2023
 DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
 ILMU PEMERINTAHAN,

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Politik;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321. Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1144/Un.08/FISIP. I/PP.00.9/06/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh
2. Kepada Kantor Camat Kuta Alam

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MOHD RIZKI / 170801107**
Semester/Jurusan : XI / Ilmu Politik
Alamat sekarang : Meunasah Baktrieng kecamatan krueng barona jaya kabupaten Aceh besar provinsi Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI PARA NELAYAN (studi kasus Gampong Lampulo kecamatan Kuta alam kota banda Aceh)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 08 Juni 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Eka Januar, M.Soc.Sc.

Berlaku sampai : 10 November
2023



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon Banda Aceh (0651) 22888

Faxsimile (0651) 22888, Website : <http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id>, Email : kesbangpolpemkoba@gmail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 459

- Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor; 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh
- Membaca : Surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: B-1144/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/06/2023 Tanggal 08 Juni 2023 tentang Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian
- Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan
- Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :
- Nama : Mohd Rizki
- Alamat : Jl. Lamreung Gampong Meunasah Bak Trieng Kec. Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar
- Pekerjaan : Mahasiswa
- Kebangsaan : WNI
- Judul Penelitian : Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Para Nelayan (Studi Kasus Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)
- Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Para Nelayan (Studi Kasus Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh) (Pengumpul dan Wawancara)
- Tempat/Lokasi/
Daerah Penelitian : - Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh
- Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh
- Tanggal dan/atau
Lamanya Penelitian : 3 (tiga) Bulan
- Bidang Penelitian : -
- Status Penelitian : Baru
- Penanggung Jawab : Eka Januar, M.Soc.Sc. (Wakil Dekan)
- Anggota Peneliti : -
- Nama Lembaga : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Sponsor : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh
Pada Tanggal : 22 Juni 2023

a.n **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
KOTA BANDA ACEH,

Sekretaris,

Ir. Yustanidar
Pembina Tk. II/MP. 19670711 200112 2 002

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Peringgal.

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan dibawah ini bertujuan untuk mencari data penelitian tentang “ Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Para Nelayan Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh). Adapun daftar pertanyaan wawancara sebagai berikut:

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA KEPADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BANDA ACEH	
1.	Apakah Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Banda Aceh mempunyai peran penting untuk mensejahterakan para nelayan?
2.	Apakah ada kegiatan sosialisasi yang dilakukan dari dinas perikanan tentang program pemberdayaan ekonomi para nelayan? Jika ada bagaimana bentuk sosialisasi tersebut?
3.	Apa saja program pemberdayaan para nelayan yang diadakan Dinas Perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan ?
4.	Apa tujuan dari dinas perikanan diadakannya program pemberdayaan nelayan ?
5.	Apakah dengan adanya program pemberdayaan para nelayan yang diterapkan sudah terealisasi dengan baik?
6.	Bantuan apa yang diberikan dari dinas untuk meningkatkan perekonomian para nelayan?
7.	Apa syarat-syarat kriteria nelayan yang diberikan bantuan?
8.	Bagaimana proses penyaluran bantuan dari Dinas Perikanan untuk nelayan ?
9.	Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program pemberdayaan nelayan ?
10.	Apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan program pemberdayaan

nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA KEPADA PARA NELAYAN	
--	--

1.	Sudah berapa lama bapak menjadi nelayan ?
2.	Apa saja program yang diadakan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh yang bapak ketahui untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan ?
3.	Apakah dalam perencanaan program melibatkan musyawarah dengan nelayan ?
4.	Apakah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh pernah memberikan bantuan selama bapak menjadi nelayan ? jika pernah apa saja bantuan yang bapak dapatkan ?
5.	Berapa tahun sekali Dinas memberikan bantuan ?
6.	Apa dampak dari hasil setelah bapak mendapatkan bantuan ?
7.	Apakah bantuan yang diberikan pemerintah sudah tepat sasaran ?
8.	Apakah nelayan memiliki organisasi koperasi ?
9.	Apakah yang menjadi kendala bapak selama menjadi nelayan, apakah keterbatasan modal dan alat tangkap ?
10.	Jika kondisi alam tidak memungkinkan untuk melaut, bahkan bisa jadi beberapa hari, secara tidak langsung bisa menghambat pendapatan bapak, jadi untuk mengatasi itu apa usaha bapak untuk menambah pendapatan

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan ka.bidang perikanan bapak Logi Lisandra



Wawancara dengan bapak supriadi, nelayan gampong lampulo



Wawancara dengan bapak supriadi, nelayan gampong lampulo



Wawancara dengan bapak puteh ali dan abdul aziz, nelayan gampong lampulo



Wawancara dengan bapak puteh ali dan abdul aziz, nelayan gampong lampulo

